

**INDIKATOR KESEJAHTARAAN RAKYAT
KOTA MAKASSAR
TAHUN 2017**

**No Publikasi : 71520.1503
Katalog : 4101004.71
Ukuran Buku : 8,5" x 11"**

**Pembina : Kepala BPS Kota Makassar
Pengarah : Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik**

Tim Penyusun : Seksi Statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

**Gambar Kulit : Seksi Statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Lay Out : Seksi Statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik**

**Diterbitkan Oleh:
Badan Pusat Statistik Kota Makassar**

**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MAKASSAR
Jl. Abdurahman Basalamah I Makassar 90231
Telp. 0411 442698
Fax. 0411 442698
e-mail: bps7371@bps.go.id
Homepage: <http://makassarkota.bps.go.id>**

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar Tahun 2017 disusun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen data yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.

Publikasi ini memuat berbagai indikator antara lain, Indikator Kependudukan, Fertilitas dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Perumahan dan indikator lainnya. Indikator-indikator tersebut, secara umum dapat menggambarkan tingkat Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar.

Kami menyadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memuaskan semua konsumen data. Saran yang konstruktif tetap diharapkan guna penyempurnaan publikasi berikutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga publikasi ini dapat diterbitkan.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data dalam menganalisis dan merencanakan berbagai kegiatan untuk pembangunan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar.

Makassar, November 2018

Badan Pusat Statistik

Kota Makassar

Kepala, ~



Ir. Ari Prihandini, M. Si

NIP. 196802221994012001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	x
TABEL LAMPIRAN.....	xi
ISTILAH TEKHNIS	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Ruang Lingkup.....	2
1.4. Konsep dan Defenisi	3
1.5. Sumber Data	5
1.6. Sistimatika Penulisan	6
BAB II KEPENDUDUKAN	8
2.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	8
2.2. Pertumbuhan Penduduk.....	10
2.3. Penyebaran dan Kepadatan Penduduk	11
2.4. Komposisi Penduduk dan Beban Tanggungan	13
2.5. Sex Ratio	15
2.6. Status Perkawinan	16
BAB. III FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA.....	18
3.1. Usia Perkawinan Pertama	18
3.2. Jumlah Anak Yang Dilahirkan Hidup	20
3.3. Pemakain Alat/Cara KB.....	21
BAB IV KESEHATAN	23
4.1. Status Kesehatan Masyarakat.....	23
4.2. Keluhan Kesehatan	24
4.3. Lama Hari Sakit	24
4.4. Penolong Persalinan	25

4.5. Pemberian Air Susu Ibu (ASI).....	26
4.6. Sarana Kesehatan.....	27
BAB V PENDIDIKAN	29
5.1. Sarana Pendidikan.....	29
5.2. Rasio Murid Guru.....	30
5.3. Rasio Murid Sekolah.....	31
5.4. Angka Partisipasi Sekolah.....	34
5.5. Kemampuan Membaca dan Menulis (Tingkat Buta Huruf).....	35
5.6. Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan/Dimiliki.....	37
BAB VI KETENAGAKERJAAN	39
6.1. Penduduk Menurut Jenis Kegiatan.....	40
6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka.....	40
6.3. Lapangan Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan.....	42
6.4. Status Pekerjaan.....	43
6.5. Lama Jam Bekerja.....	45
BAB VII PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.....	46
7.1. Status Penguasaan Rumah.....	46
7.2. Kondisi Fisik Bangunan Tempat Tinggal.....	47
7.3. Fasilitas Tempat Tinggal.....	52
BAB VIII INDIKATOR LAINNYA.....	57
8.1. Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita.....	57
8.2. Kemiskinan.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penduduk Kota Makassar Tahun 2016 dan 2017	9
Tabel 2.2 Pertumbuhan Penduduk Kota Makassar dan Sulawesi Selatan Tahun 2016 dan 2017	10
Tabel 2.3 Distribusi dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2017	12
Tabel 2.4 Angka Beban Ketergantungan Kota Makassar Tahun 2016 – 2017 (%)	14
Tabel 2.5 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur di Kota Makassar 2016-2017	15
Tabel 2.6 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan Kota Makassar 2016-2017	17
Tabel 3.1 Persentase Wanita Usia 10 tahun Keatas yang Pernah Kawin Menurut Jumlah Anak Lahir Hidup (ALH) di Kota Makassar 2016 - 2017	20
Tabel 3.2 Jumlah dan Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Menikah menurut Penggunaan Kontrasepsi di Kota Makassar, 2016 - 2017	21
Tabel 3.3 Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun yang Kawin Menurut Jenis Alat Kontrasepsi yang digunakan Di Kota Makassar 2016 - 2017	22
Tabel 4.1 Persentase Penduduk Kota Makassar yang Mengalami Keluhan Kesehatan 2016 - 2017	24
Tabel 4.2 Persentase Penduduk Penderita Sakit menurut Jumlah Hari Sakit Kota Makassar, 2016 – 2017	25
Tabel 4.3 Persentase Perempuan Berumur 15-49 tahun yang pernah kawin menurut Penolong kelahiran anak yang terakhir di Kota Makassar 2016–2017	26
Tabel 4.4 Persentase Anak Berusia Kurang dari 2 tahun yang pernah Disusui Menurut Lama Disusui Kota Makassar 2017	27
Tabel 4.5 Banyaknya Sarana Kesehatan menurut Jenisnya di Kota Makassar 2016 - 2017	28
Tabel 5.1 Rasio Murid Guru di Kota Makassar Tahun Ajaran 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017	30
Tabel 5.2 Rasio Murid Sekolah di Kota Makassar Tahun Ajaran 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017	31

Tabel 5.3 Rasio Murid Sekolah dan Rasio Murid Guru Menurut Kecamatan di Kota Makassar 2016/2017.....	32
Tabel 5.4 Jumlah Murid, Guru dan Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Makassar 2017	33
Tabel 5.5 Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12Tahun, 13-15 Tahun dan 16-18 Tahun Kota Makassar 2016 – 2017	34
Tabel 5.6 Kemampuan Baca Tulis Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Kota Makassar 2016 – 2017	37
Tabel 5.7 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Yang Ditamatkan di Kota Makassar Tahun 2017.....	38
Tabel 6.1 Penduduk usia 15 tahun keatas menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu Yang Lalu di Kota Makassar Tahun 2015 dan 2017.....	40
Tabel 6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Usia 15 tahun Keatas di Kota Makassar Tahun 2015 dan 2017	41
Tabel 6.3 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kota Makassar Tahun 2017	42
Tabel 6.4 Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama seminggu Yang Lalu menurut Jenis Pekerjaan Kota Makassar Tahun 2017	43
Tabel 6.5 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Kota Makassar Tahun 2017	44
Tabel 6.6 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya di Kota Makassar Tahun 2017.....	45
Tabel 7.1 Rumahtangga menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Kota Makassar, 2016– 2017	47
Tabel 7.2 Persentase Rumahtangga menurut Luas Lantai di Kota Makassar Tahun 2016 dan 2017.....	48
Tabel 7.3 Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Kota MakassarTahun 2017	49
Tabel 7.4 Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kota MakassarTahun 2016 - 2017.....	51
Tabel 7.5 Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Makassar Tahun 2016-2017.....	53

Tabel 7.6 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja Di Kota Makassar.....	55
Tabel 7.7 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Penerangan Di Kota Makassar Tahun 2016 dan 2017	56
Tabel 8.1 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Per Bulan Kota Makassar Tahun 2017	57
Tabel 8.2 Pengeluaran perkapita sebulan dan pola konsumsi di Kota Makassar Tahun 2016-2017	58
Tabel 8.2 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase, dan Garis Kemiskinan di Kota Makassar Tahun 2015 – 2017	60

<https://makassarkota.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Penduduk Kota Makassar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 dan 2017	10
Grafik 2. Distribusi Penduduk Kota Makassar per kecamatan Tahun 2017....	13
Grafik 3. Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perkawinan Pertama ..	19
Grafik 4 Persentase Penduuduk Usia 15 Tahun Keatas menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2017	38
Grafik 5 Persentase Rumahtangga Menurut Luas Lantai Kota Makassar Tahun 2017	49
Grafik 6 Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Dinding Terluas Di Kota Makassar Tahun 2017	50
Grafik 7 Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kota Makassar Tahun 2016 dan 2017.....	52
Grafik 8 Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Makassar Tahun 2016 dan 2017.....	54
Grafik 9 Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Penerangan di Kota Makassar Tahun 2016 dan 2017.....	56
Grafik 10 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Makassar Tahun 2008-2017.....	61

<https://makassar.go.id>

TABEL LAMPIRAN

Tabel 2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2012 s/d 2017	64
Tabel 2.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017.....	65
Tabel 2.3 Angka Beban Tanggungan dan Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017	66
Tabel 2.4 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017	67
Tabel 3.1 Persentase Wanita Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Usia Perkawinan Pertama dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017.....	68
Tabel 3.2 Persentase Akseptor KB Menurut Alat/cara Kontrasepsi yang Sedang Digunakan dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017	69
Tabel 3.3 Persentase Partisipasi KB Wanita Umur 15-49 Tahun Berstatus Kawin Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017	70
Tabel 4.1 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur Pendidikan (7-18 Tahun) di Sulawesi Selatan Tahun 2017	71
Tabel 4.2 Angka Partisipasi Murni Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur Pendidikan (7-18 Tahun) di Sulawesi Selatan Tahun 2017	72
Tabel 4.3 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017	73
Tabel 4.4 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi Ditamatkan di Sulawesi Selatan Tahun 2017.....	74
Tabel 5.1 Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017	75
Tabel 5.2 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Lalu Terhadap Total Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Sulawesi Selatan Tahun 2017	76

Tabel 5.3	Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Sebulan Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Hari Sakit di Sulawesi Selatan Tahun 2017	77
Tabel 5.4	Persentase Balita Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Persalinan Terakhir di Sulawesi Selatan Tahun 2017	78
Tabel 5.5	Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Disusui Menurut Kabupaten/Kota dan Lamanya Disusui di Sulawesi Selatan Tahun 2017	79
Tabel 6.1	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017	80
Tabel 6.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017	81
Tabel 6.3	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017	82
Tabel 6.4	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017	83
Tabel 7.1	Persentase Rumah tangga Menurut Luas lantai Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017	85
Tabel 7.2	Persentase Rumah tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Sulawesi Selatan Tahun 2017	85
Tabel 7.3	Persentase Rumah tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Sulawesi Selatan Tahun 2017	86
Tabel 7.4	Persentase Rumah tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Rumah di Sulawesi Selatan Tahun 2017	87
Tabel 8.1	Pola Konsumsi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pengeluaran Tahun 2017	88
Tabel 8.2	Jumlah (000) dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017	89
DAFTAR PUSTAKA		90

ISTILAH TEKHNIS

Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk

Angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dalam persentase dengan menggunakan rumus eksponensial.

Kepadatan Penduduk

Rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi

Rasio Dan Jenis Kelamin

Rasio antara banyaknya laki-laki dengan banyaknya perempuan dikalikan 100.

Metode Kontrasepsi

Cara/alat pencegah kehamilan.

Peserta Keluarga Berencana (Akseptor)

Orang yang mengikuti/memakai salah satu metode kontrasepsi.

Angka Kematian Bayi (AKB)

Besarnya probabilitas bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan per seribu kelahiran).

Angka Harapan Hidup (AHH) Pada Waktu Lahir

Angka perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk.

Penduduk Usia Kerja

Penduduk yang berusia 10 tahun keatas.

Bekerja

Melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu yang lalu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu

memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.

Angkatan Kerja

Penduduk usia 10 tahun keatas yang bekerja atau mencari pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia 10 tahun keatas.

Penganggur

Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

Dependency Ratio/Angka Beban Tanggungan (ABT).

Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (dibawah 15 tahun dan 64 tahun keatas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 tahun sampai 64 tahun) dikalikan 100.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Ukuran tingkat partisipasi sekolah penduduk menurut batas usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan.

Angka Buta Huruf

Ukuran persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang tidak bisa membaca dan menulis

Luas Lantai

Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya tujuan pokok dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud tidak hanya menyangkut kemampuan mencukupi kebutuhan yang bersifat materiil (sandang, papan dan pangan), namun juga pemenuhan kebutuhan yang bersifat nonmateriil (pendidikan, kesehatan, sanitasi lingkungan, dll). Dengan pemenuhan kebutuhan ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia. Disisi lain sumber daya manusia dalam proses pembangunan dapat menjadi potensi dapat pula menjadi beban pembangunan.

Sejalan dengan pergantian masa dan kepemimpinan, apalagi sejak diterapkannya Undang- undang Otonomi Daerah telah mengubah sistem kebijakan negara ini dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan ini tentunya akan menimbulkan beberapa tantangan dan pertanyaan apakah dengan desentralisasi akan menjamin bahwa kepentingan rakyat banyak akan terpenuhi. Pertanyaan ini akan terjawab bila ada kesepakatan nasional untuk menyamakan persepsi mengenai pembangunan nasional. Dimana kesepakatan itu menjamin bahwa semua rakyat Indonesia sebagai warga negara berhak atas standar pembangunan manusia, seperti baca tulis, mendapat pendidikan yang setinggi-tingginya, hidup sehat, berpenghasilan yang layak, menghuni rumah yang memadai, beribadah dengan tenang sehingga kita bisa hidup sebagai bangsa dengan damai dan nyaman.

Dalam proses pembangunan senantiasa diupayakan peningkatan kemampuan dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dan juga menikmati hasil pembangunan, dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, pembangunan yang diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan perlu diukur tingkat keberhasilannya, dan untuk mengukur pelaksanaan pembangunan secara luas yang meliputi unsur perencanaan, pemantauan dan evaluasi, tentunya diperlukan data statistik. Peranan data sangat penting karena data merupakan bahan baku bagi penyusunan statistik/indikator yang digunakan

untuk melihat keadaan, memantau dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Di sinilah peran serta BPS, khususnya dalam menyediakan data-data statistik yang diperlukan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan salah satu survei yang dilaksanakan oleh Badan pusat Statistik (BPS). Survei ini dilaksanakan tiap triwulan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan data yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Data yang dihasilkan dari survei ini meliputi informasi tentang demografi, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, keluarga berencana dan kemampuan daya beli masyarakat.

1.2. Tujuan

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2017 diterbitkan sebagai salah satu upaya mengantisipasi kebutuhan data guna pengukuran tingkat pembangunan di Kota Makassar. Publikasi ini berisi kumpulan indikator yang berkaitan dengan berbagai aspek kesejahteraan, yang diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar dan selanjutnya dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Disamping itu, gambaran tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pembangunan, yang dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan (rencana pembangunan pada masa yang akan datang).

1.3. RuangLingkup

Aspek kesejahteraan disadari memiliki dimensi yang sangat luas, tidak terbatas hanya menyangkut aspek materi seperti pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan perumahan, melainkan juga aspek non materi seperti pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan rasa aman. Karenanya guna melihat perkembangan taraf kesejahteraan masyarakat perlu adanya fokus perhatian pada suatu indikator sebagai petunjuk yang memberikan indikasi tentang perkembangan tersebut. Dengan memperhatikan fokus dan pembatasan masalah, yang dicakup dalam indikator kesejahteraan ini meliputi

aspek-aspek kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan aspek sosial ekonomi lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Indikator menurut jenisnya dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu: indikator masukan, indikator proses dan indikator keluaran/dampak. Dalam publikasi ini ketiga indikator tersebut disajikan dengan ukuran-ukuran seperti jumlah, proporsi, rasio dan angka/tingkat. Penyajian indikator sebagian besar merupakan agregasi pada tingkat Kota Makassar, sementara beberapa indikator yang disajikan pada tingkat kecamatan.

1.4. Konsep dan Defenisi

Untuk menghindari kesalahpahaman atas konsep yang digunakan maka sebelum data tersebut dikumpulkan terlebih dahulu ditentukan batasan terhadap keterangan yang akan dikumpulkan dan batasan tersebut diusahakan baku dan berlaku umum untuk para pemakai data.

Adapun konsep dan defenisi tersebut adalah:

Rumah Tangga Biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu.

Rumah Tangga Khusus adalah orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan sekelompok orang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih. Rumah tangga khusus ini tidak dicakup dalam Susenas.

Kepadatan penduduk adalah rata-rata banyaknya penduduk perkilometer persegi.

Rasio Jenis Kelamin adalah perbandinganantara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan dikali 100.

Kawin adalah mempunyai istri/suami pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum, tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.

Cerai Hidup adalah berpisah sebagai suami/istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ke tempat lain karena mencari pekerjaan.

Cerai Mati adalah ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.

Metode Kontrasepsi adalah alat/cara pencegah kehamilan.

Sekolah adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal mulai dari pendidikan sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.

Tidak atau Belum Pernah Sekolah adalah tidak atau belum pernah sekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat. Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Masih Bersekolah adalah sedang mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi.

Tidak Sekolah lagi adalah pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.

Melek Huruf adalah penduduk 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya.

Angka partisipasi Sekolah adalah ukuran yang menunjukkan tingkat partisipasi sekolah penduduk menurut batasan usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan.

Keluhan Kesehatan adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, atau hal lain. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Bekerja adalah Kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus selama seminggu yang lalu. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.

Menganggur adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran termasuk mereka yang tidak bekerja tetapi sedang

mencari pekerjaan, telah diterima bekerja tetapi belum bekerja dan yang di PHK tetapi masih berhasrat untuk bekerja.

Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti, dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya. Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah Penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan tersebut (angkatan kerja) dibandingkan dengan penduduk usia 15 tahun keatas.

$$TPAK = \frac{AK}{P_{15+}} \times 100$$

Keterangan: AK = Angkatan Kerja
P₁₅₊ = Penduduk usia 15 tahun keatas

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah Perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja.

$$TPT = \frac{TM}{AK} \times 100\%$$

Keterangan: PT = Tingkat Pengangguran Terbuka
TM = Jumlah Penduduk yang mencari pekerjaan
AK = Jumlah Angkatan Kerja

Angka Beban Tanggungan adalah Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia non produktif (usia dibawah 15 tahun dan usia 65 tahun keatas) dengan penduduk usia produktif (antara usia 15 tahun sampai usia 64 tahun) dikali 100.

Penduduk Muda adalah penduduk usia 0-14 tahun dibagi penduduk usia 15-64 tahun dikali 100.

Penduduk Tua adalah penduduk usia 65 tahun keatas dibagi penduduk usia 15-64 tahun dikali 100.

1.5. Sumber Data

Publikasi ini disusun dengan sumber data utama berasal dari hasil survei yang dilaksanakan oleh BPS yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas),

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) ditambah beberapa data lain yang terkait. Susenas merupakan survei dengan cakupan data sosial yang paling luas, dan sangat potensial untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat. Data yang dicakup dalam Susenas antara lain bidang kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan hidup, serta konsumsi rumahtangga.

Untuk itu, data Susenas sangat potensial untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat, ilustrasi mengenai keadaan berbagai komponen sosial dapat diketahui dengan menyusun data agregat berupa indikator seperti tingkat partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk, yang termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, persentase akseptor KB, persentase ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga medis, persentase rumahtangga yang menggunakan sumber air bersih, menikmati listrik dan rata-rata pengeluaran sebulan.

1.6. Sistematika Penulisan

Indikator kesejahteraan rakyat Kota Makassar disusun dalam tujuh bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, sebagai pendahuluan yang mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, konsep dan definisi, sumber data dan sistematika penulisan.

Bab kedua, tentang hal-hal kependudukan dan Keluarga Berencana, yaitu perkembangan penduduk, sebaran dan kepadatan penduduk, komposisi penduduk, perkawinan dan rumahtangga, fertilitas dan keluarga berencana.

Bab ketiga, merupakan bab pembahasan mengenai kesehatan, yang meliputi sarana kesehatan, keluhan kesehatan, penolong persalinan, serta pemberian ASI.

Bab keempat, dibahas kondisi pendidikan yang mencakup sarana pendidikan, rasio murid-guru, rasio murid sekolah, angka partisipasi sekolah, kemampuan membaca dan menulis dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Bab kelima, digambarkan kondisi ketenagakerjaan yang mencakup penduduk menurut jenis kegiatan, partisipasi angkatan kerja dan pengangguran, lapangan usaha, jenis pekerjaan dan status pekerjaan.

Bab keenam, merupakan bab yang membahas tingkat sosial yang berkaitan dengan perumahan dan lingkungan hidup, kondisi fisik bangunan tempat tinggal, utilitas dan fasilitas tempat tinggal.

Bab ketujuh, merupakan bab terakhir yang memberikan gambaran yang menyangkut ekonomi rumahtangga yang mencakup pengeluaran rumahtangga menurut golongan pengeluaran.

<https://makassarkota.bps.go.id>

BAB II

KEPENDUDUKAN

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan karena tidak saja menjadi sasaran tetapi juga menjadi pelaksana dari pembangunan. Oleh karena itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan, perkembangan penduduk perlu diarahkan sehingga mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang menguntungkan pembangunan.

Sementara itu, perluasan analisis khususnya bidang kependudukan akan terus berkembang seiring dengan makin majunya peradaban manusia. Oleh karena itu, tersedianya data kependudukan yang akurat dan tepat waktu sangat dibutuhkan oleh para perencana pembangunan maupun pelaku bisnis.

Pemerintah sangat membutuhkan data jumlah penduduk dan karakteristiknya, misalnya untuk merencanakan penyediaan sarana umum, perumahan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan tempat rekreasi. Sementara para pelaku bisnis memerlukan data penduduk untuk keperluan rencana produksi, pemasaran dan rekrutmen pekerja/karyawan. Dalam berbagai pihak, bagi lembaga swasta nonprofit data ini sangat dibutuhkan untuk bahan analisis suatu masalah tertentu.

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah penduduk yang mencakup antara lain jumlah, komposisi dan distribusi penduduk. Oleh sebab itu dalam bab ini akan disajikan tentang jumlah dan pertumbuhan penduduk, penyebaran dan kepadatan penduduk, komposisi penduduk dan beban tanggungan, rasio jenis kelamin dan status perkawinan.

2.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2017 berdasarkan hasil proyeksi penduduk sebesar 1.489.011 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 736.912 jiwa dan perempuan 752.099 jiwa. Dengan demikian, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki dengan

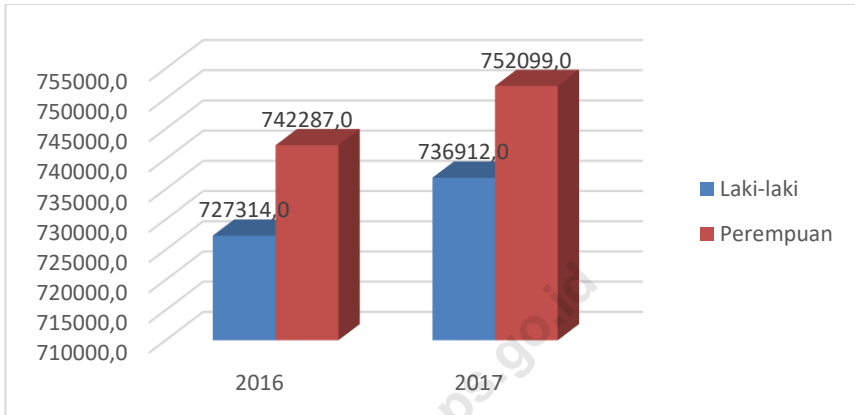
perbandingan jenis kelamin (sex ratio) sebesar 97,98. Yang berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 97 hingga 98 jiwa penduduk laki-laki. Penduduk ini tersebar pada 15 kecamatan terdiri dari 153 kelurahan dengan total luas 175,77 km², sehingga kepadatan penduduk di Kota Makassar pada tahun 2017 sekitar 8.471 jiwa per km². Angka ini lebih tinggi dibanding tahun 2016 yang hanya mencapai 8.361 jiwa per km².

Tabel 2.1
Penduduk Kota Makassar Tahun 2016 dan 2017

Uraian	Tahun	
	2016	2017
Jumlah Penduduk	1.469.601 jiwa	1.489.011 jiwa
- Laki-laki	727.314 jiwa	736.912 jiwa
- Perempuan	742.287 jiwa	752.099 jiwa
Rasio Jenis Kelamin	97,98	97,98
Kepadatan penduduk	8.361 jiwa/km ²	8471 jiwa/ km ²

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Tahun 2016-2017

Grafik 1
Jumlah Penduduk Kota Makassar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 dan 2017



2.2. Pertumbuhan Penduduk

Usaha untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk selalu menjurus kepada pengkajian bagaimana cara menurunkan tingkat fertilitas, sebab upaya ini merupakan salah satu komponen utama yang berpengaruh terhadap banyaknya penduduk.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar untuk periode 2016 dan 2017 sebesar 1,32 persen. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk untuk provinsi Sulawesi Selatan, adalah sebesar 0,98 persen, lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat lampiran 1.

Tabel 2.2
Pertumbuhan Penduduk Kota Makassar dan Sulawesi Selatan Tahun 2016 dan 2017

wilayah	2016	2017	Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Makassar	1.469.601 jiwa	1.489.011 jiwa	1,32
Provinsi Sulawesi Selatan	8.606.375 jiwa	8.690.294 jiwa	0,98

Sumber: Makassar Dalam Angka 2017, BPS

2.3. Penyebaran dan Kepadatan Penduduk

Konsekuensi yang timbul dari permasalahan berkembangnya penduduk adalah bagaimana penyebarannya. Apakah terkonsentrasi pada suatu wilayah atau tersebar normal merata di seluruh wilayah. Ukuran sebaran dan kepadatan penduduk yang ideal sulit untuk ditentukan karena bergantung pada potensi yang dimiliki suatu wilayah serta kemampuan penduduk dalam memanfaatkan potensi yang ada. Umumnya konsentrasi penduduk yang tinggi akan sangat rawan terhadap konflik sosial, selain itu juga menyulitkan pemerintah dalam penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Sebaliknya konsentrasi penduduk yang rendah akan menyebabkan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat menjadi relatif mudah

Jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2017 tercatat 1,449,401 jiwa yang tersebar pada 15 kecamatan. Distribusi penduduk menurut kecamatan menunjukkan keadaan sebaran yang tidak merata.

Tabel 2.3 memperlihatkan bahwa perbedaan distribusi penduduk setiap kecamatan dengan persentase luas wilayah mengakibatkan kepadatan penduduk setiap kecamatan juga berbeda-beda. Secara keseluruhan kepadatan penduduk di Kota Makassar yaitu sekitar 8.471 jiwa/km². Kepadatan penduduk terendah sebesar 3.563 jiwa/km² di Kecamatan Tamalanrea, sedangkan kepadatan tertinggi mencapai 33.751 jiwa/km² di Kecamatan Makassar.

Terdapat empat kecamatan yang wilayahnya cukup luas, masing-masing di atas 10 persen dari luas wilayah Kota Makassar. Sementara terdapat tujuh kecamatan lainnya yang memiliki luas wilayah masing-masing kurang dari 2 persen. Empat wilayah kecamatan terluas di Kota Makassar berturut-turut adalah Biringkanaya 48,22 Km², Tamalanrea 31,84 Km², Manggala 24,14 Km² dan Tamalate 20,21 Km².

Tabel 2.3 menunjukkan distribusi sebaran penduduk menurut kecamatan. Distribusi penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Biringkanaya sebesar

14,00 persen, Tamalate 13,31 persen, Rappocini 11,18 persen dan Kecamatan Panakkukang sebesar 9,97 persen.

Karena pola distribusi penduduk dan luas wilayah antar kecamatan berbeda, maka tingkat kepadatan yang dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk terhadap luas wilayah, memiliki pola yang berbeda pula. Pola yang terbentuk menunjukkan bahwa wilayah kota lama yang merupakan pusat niaga dan jasa memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi.

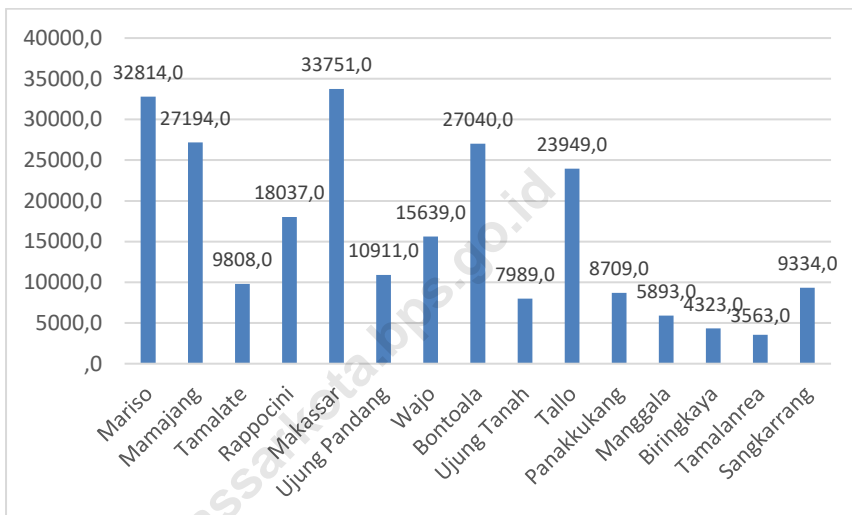
Tabel 2.3
Distribusi dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2017

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	(%)	Penduduk	(%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Mariso	1,82	1,04	59.721	4,01	32.814
02. Mamajang	2,25	1,28	61.186	4,11	27.194
03. Tamalate	20,21	11,50	198.210	13,31	9.808
04. Rappocini	9,23	5,25	166.480	11,18	18.037
05. Makassar	2,52	1,43	85.052	5,71	33.751
06. Ujung Pandang	2,63	1,50	28.696	1,93	10.911
07. Wajo	1,99	1,13	31.121	2,09	15.639
08. Bontoala	2,10	1,19	56.784	3,81	27.040
09. Ujung Tanah	4,40	2,50	35.153	2,36	7.989
10. Tallo	5,83	3,32	139.624	9,38	23.949
11. Panakkukang	17,05	9,70	148.482	9,97	8.709
12. Manggala	24,14	13,73	142.252	9,55	5.893
13. Biringkaya	48,22	27,43	208.436	14,00	4.323
14. Tamalanrea	31,84	18,11	113.439	7,62	3.563
15. Sangkarrang	1,54	0,88	14.375	0,97	9.334
Jumlah	175,77	100,00	1.489.011	100,00	8.471

Sumber: Makassar Dalam Angka 2017, BPS

Untuk itu sangatlah logis apabila pengembangan wilayah pemukiman penduduk dapat diarahkan pada wilayah dengan tingkat kepadatan yang masih rendah, seperti pada kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea dan Manggala.

Grafik 2
Distribusi Penduduk Kota Makassar per kecamatan Tahun 2017



2.4. Komposisi Penduduk dan Beban Tanggungan

Selain jumlah, pertumbuhan dan kepadatan penduduk, indikator lainnya yang perlu diketahui adalah komposisi penduduk, seperti komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Indikator ini menjadi penting sebagai petunjuk perkembangan taraf kesejahteraan karena kejadian demografis maupun karakteristiknya berbeda menurut umur dan jenis kelamin baik untuk kejadian kelahiran, kematian maupun perpindahan penduduk. Komposisi penduduk menurut umur dapat menggambarkan besarnya tingkat kelahiran yakni dengan melihat perubahan persentase penduduk usia muda. Indikator turunan lainnya yang dapat digambarkan dari komposisi kelompok umur adalah angka beban ketergantungan (ABK) yaitu perbandingan antara banyaknya penduduk umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas yang dianggap sebagai usia tidak produktif terhadap penduduk umur 15-64 tahun yang dianggap sebagai usia produktif.

Dengan mengetahui struktur umur penduduk, kita dapat mengukur besarnya dependency ratio (Angka Beban Ketergantungan), yang selanjutnya disebut “beban ketergantungan”. Beban ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang secara ekonomis tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun) dengan jumlah penduduk yang secara ekonomis dianggap produktif (usia 15-64 tahun). Sehingga semakin kecil porsi penduduk yang berusia non produktif, maka semakin kecil pula angka beban ketergantungan itu dan sebaliknya semakin besar porsi penduduk berusia non produktif, maka semakin besar pula angka beban ketergantungan tersebut.

Dari tabel 2.4 di bawah ini memperlihatkan beban ketergantungan penduduk Kota Makassar pada tahun 2016 sebesar 45,42 dan turun menjadi 44,29 pada tahun 2017. Angka tersebut pada tahun 2017 memberikan gambaran bahwa setiap 100 penduduk produktif di Kota Makassar harus menanggung secara ekonomis sekitar 44 penduduk usia tidak produktif. Turunnya angka beban ketergantungan pada tahun 2017 disebabkan meningkatnya penduduk usia produktif 15-64 tahun dan menurunnya jumlah penduduk berusia 0-4 th.

Tabel 2.4
Angka Beban Ketergantungan Kota Makassar Tahun 2016 – 2017 (%)

Angka Beban Ketergantungan	2016			2017		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penduduk Muda (0-14 thn /15-64 thn)	39,78	40,20	39,99	41,06	36,53	38,75
Penduduk Tua (65+ /15-64 thn)	4,82	6,03	5,43	5,23	5,84	5,54
Total	44,60	46,23	45,42	46,29	42,37	44,29

Sumber: Makassar Dalam Angka 2017, BPS

Jika usia tidak produktif dibedakan antara usia muda (0-14 tahun) dan usia tua (usia 65+), maka angka beban tanggungan dibedakan menjadi angka beban tanggungan penduduk muda dan angka beban tanggungan penduduk tua.

Dalam kurun 2016-2017 angka beban tanggungan penduduk muda mengalami penurunan sebesar 1,24 poin. Sementara itu, angka beban tanggungan penduduk tua mengalami peningkatan sebesar 0,11 poin. Namun demikian, penduduk muda masih dominan sebagai beban tanggungan penduduk usia produktif, karena angka beban tanggungan penduduk tua relatif kecil, yaitu 5,43 pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 sebesar 5,54.

2.5. Sex Ratio

Sex Ratio (ratio jenis kelamin) penduduk Kota Makassar pada tahun 2017 sebesar 97,98, artinya di Kota Makassar terdapat 98 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa pada kelompok umur 0-4 tahun dan kelompok umur 5-14 tahun sex rasionya di atas 100, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Sebaliknya pada kelompok umur/usia sedang (15-64) dan kelompok penduduk tua (65+) sex rasionya dibawah 100, yang berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki.

Tabel 2.5
Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut
Kelompok Umur di Kota Makassar 2016-2017

Kelompok Umur	2016			2017		
	Laki-Laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 - 4	70.626	67.503	104,63	74.073	67.173	110,27
5 - 14	123,351	118.044	104,50	146.459	137.402	106,59
15 - 64	511,127	525.288	97,30	477.451	496.480	96,16
65 +	22,210	31.452	70,62	38.929	51.044	76,26
Total	727,314	742.287	97,98	736.912	752.099	97,98

Sumber: Makassar Dalam Angka 2017, BPS

Pola yang terbentuk dari komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin adalah rasio jenis kelamin penduduk usia dewasa lebih rendah dari penduduk usia muda. Atau dengan kata lain, pada kelompok usia muda jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan. Sedangkan pada kelompok usia dewasa, jumlah laki-laknya lebih sedikit dibanding jumlah perempuan. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat migrasi dan rendahnya tingkat harapan hidup penduduk laki-laki dibanding perempuan.

2.6. Status Perkawinan

Perkawinan merupakan awal terbentuknya suatu keluarga. Keluarga adalah suatu kelompok masyarakat terkecil yang biasanya terdiri dari suami istri dan anak dan ditandai dengan adanya hubungan darah. Namun karena suatu hal, adakalanya keluarga dapat hanya terdiri dari suami-isteri bagi keluarga yang baru terbentuk, ibu dan anak, atau ayah dan anak.

Status perkawinan dibedakan menjadi empat kelompok, yakni belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati. Perkembangan atau perubahan status perkawinan dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan, kaitannya dengan tingkat kelahiran dan hubungan sosial. Umumnya, suatu daerah dengan proporsi kawin yang tinggi cenderung memiliki jumlah kelahiran yang tinggi. Kemudian tingginya proporsi penduduk berstatus cerai hidup merupakan gambaran tingginya tingkat perceraian.

Penduduk menurut status perkawinan dapat dibedakan menurut dua kelompok yaitu belum kawin dan pernah kawin. Pernah kawin meliputi mereka yang kawin, cerai hidup dan cerai mati.

Pengertian kawin yang dicakup dalam survei ini adalah penduduk yang terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin secara sah/resmi tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekitar dianggap sebagai suami istri.

Pada Tabel 2.6 ditampilkan persentase penduduk menurut status perkawinan penduduk Kota Makassar usia 10 tahun ke atas tahun 2016 dan 2017. Nampak

bahwa proporsi penduduk berstatus kawin mengalami peningkatan sebesar 1,86 persen selama tahun 2016-2017, yaitu dari 48,91 persen menjadi 50,77 persen. Persentase status perkawinan cerai hidup mengalami penurunan sebesar 0,35 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki yang berstatus kawin mengalami peningkatan sebesar 2,71 persen, sedangkan penduduk perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,85 persen. Selama tahun 2016-2017, angka perceraian di Kota Makassar naik sebesar 0,06 persen.

Angka cerai mati penduduk perempuan baik ditahun 2016 maupun ditahun 2017 selalu jauh lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih bertahan untuk tidak menikah ketika berstatus cerai mati disbanding penduduk laki-laki.

Tabel 2.6
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan Kota Makassar 2016-2017

Status Perkawinan	2016			2017		
	L	P	L+ P	L	P	L+ P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belum Kawin	47,45	40,18	43,78	45,09	39,69	42,32
Kawin	49,30	48,52	48,91	52,01	49,60	50,77
Cerai Hidup	1,72	2,96	2,35	1,46	3,71	2,61
Cerai Mati	1,53	8,34	4,96	1,44	7,00	4,29

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2016-2017

BAB. III

FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA

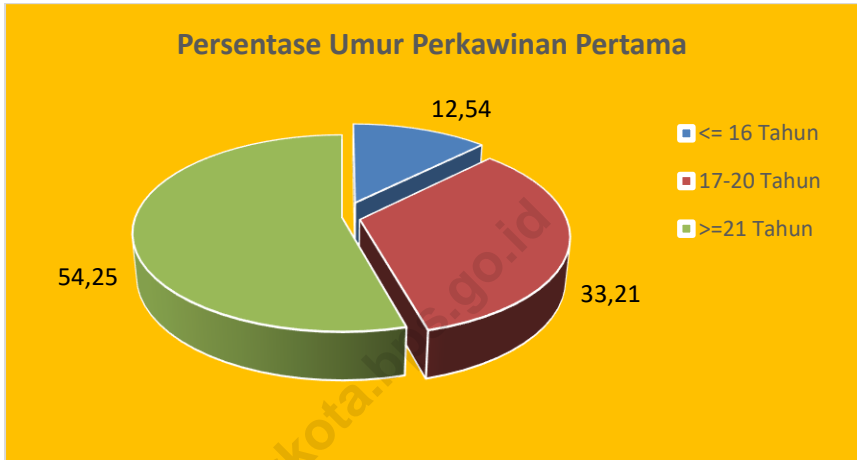
Salah satu langkah yang dapat diambil untuk menanggulangi masalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk adalah dengan cara menekan tingkat fertilitas, yaitu melalui pembatasan dan penjarangan kelahiran. Proses ini dilaksanakan dengan cara mengajak masyarakat, khususnya pasangan usia subur untuk ikut berperan aktif dalam gerakan keluarga berencana. Gerakan ini bukan sekedar untuk menekan laju pertumbuhan penduduk tetapi lebih dari itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Himbauan untuk menunda usia perkawinan pertama dan membatasi jumlah kelahiran merupakan usaha nyata dalam merealisasikan tujuan tersebut.

3.1. Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat fertilitas, karena semakin tinggi umur perkawinan, khususnya wanita menyebabkan masa reproduksinya lebih pendek. Hal ini berarti pula bahwa penundaan perkawinan mengakibatkan berkurangnya peluang wanita untuk melahirkan anak lebih banyak.

Perkawinan yang dilakukan pada usia matang (lebih dari 20 tahun) bagi perempuan akan membantu mereka menjadi lebih siap untuk menjadi ibu dan mengurangi resiko persalinan. Sementara persalinan yang dilakukan pada ibu usia kurang dari 20 tahun, lebih dari 35 tahun, pernah hamil empat kali/lebih, atau jarak waktu kelahiran terakhir kurang dari dua tahun akan semakin memperbesar resiko persalinan.

Grafik 3
Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun Keatas
Menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perkawinan Pertama (Hasil Susenas
Maret 2017)



Tabel 3.1 memperlihatkan bahwa sebagian besar wanita usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin melakukan perkawinan pertama di usia antara 17-20 tahun yaitu sebesar 33,21 persen, kemudian sebesar 54,25 persen menikah pada usia 21 tahun ke atas. Di Kota Makassar masih ada wanita yang menikah di usia 16 tahun ke bawah, yaitu sebesar 12,54 persen.

Fenomena ini patut menjadi perhatian yang serius mengingat masih banyaknya masyarakat yang menikahkan anak gadisnya dibawah 17 tahun. Faktor budaya yang tercermin dari sikap sebahagian orangtua yang merasa takut anaknya menjadi perawan tua, pemahaman yang masih rendah tentang lembaga perkawinan, juga adanya globalisasi yang menyebabkan akses dunia hiburan yang tak terkontrol dan faktor pergaulan yang bebas merupakan faktor penyebab masih banyaknya penduduk yang menikah pada usia dini.

3.2. Jumlah Anak Yang Dilahirkan Hidup

Fertilitas merupakan komponen demografi yang bersifat menambah jumlah penduduk secara alami. Karena berhubungan langsung dengan kemampuan seseorang melahirkan anak. Jika tingkat fertilitas tidak bisa dikendalikan maka ledakan jumlah penduduk akan terjadi yang pada gilirannya hal ini akan menimbulkan berbagai masalah kependudukan.

Tingkat fertilitas ditunjukkan oleh data jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh wanita pernah kawin. Jika dilihat dari jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita pernah kawin, nampak bahwa jumlah anak yang dilahirkan sebagian besar wanita pernah kawin di tahun 2017 adalah 2 orang anak dengan persentase sebesar 27,72 persen. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2016. Pada table 3.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 jumlah anak lahir hidup 0-2 tahun meningkat sedangkan jumlah anak lahir hidup 3-5+ mengalami penurunan disbanding tahun 2016.

Tabel 3.1

Persentase Wanita Usia 10 tahun Keatas yang Pernah Kawin Menurut Jumlah Anak Lahir Hidup (ALH) di Kota Makassar 2016 - 2017

Jumlah Anak Lahir Hidup (ALH)	2016 (%)	2017 (%)
(1)	(2)	(3)
0	9,89	13,95
1	19,02	21,89
2	30,38	27,72
3	22,17	19,92
4	10,44	9,20
5+	8,09	7,31

Sumber: BPS Kota Makassar, Susenas 2016 - 2017

3.3. Pemakaian Alat/Cara KB

Selain melalui penundaan usia perkawinan pertama, partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah menangani masalah kependudukan adalah berupa kesadaran masyarakat untuk mensukseskan Keluarga Berencana. Salah satu tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pembatasan dan pengaturan jarak kelahiran. Hal ini bisa ditempuh antara lain dengan cara pemakaian alat/cara kontrasepsi KB.

Indikasi makin meningkatnya partisipasi masyarakat pada gerakan keluarga berencana untuk membatasi atau menjarangkan kelahiran salah satunya dengan program KB yang bertujuan selain menurunkan tingkat fertilitas, juga untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rumah tangga.

Tabel 3.3 menyajikan keikutsertaan wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. Selama kurun waktu 2016-2017, persentase penduduk yang sedang ikut menggunakan alat/cara KB mengalami penurunan 3,28 persen yakni dari 37,23 persen di tahun 2016 menjadi 33,95 persen di tahun 2017.

Tabel 3.2

Jumlah dan Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Menikah menurut Penggunaan Kontrasepsi di Kota Makassar, 2016 - 2017

Tahun	Pengguna/Memakai alat/Cara KB		
	Sedang Menggunakan	Tidak Menggunakan Lagi	Tidak Pernah Menggunakan
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	37,23	16,41	46,36
2017	33,95	22,26	43,79

Sumber: BPS Kota Makassar, Susenas 2016-2017

Tabel 3.4 menyajikan persentase wanita umur 15-49 tahun yang berstatus kawin menurut jenis alat/cara KB yang sedang digunakan. Pemakaian jenis kontrasepsi seperti Pil KB dan alat kontrasepsi lainnya terlihat mengalami peningkatan pada tahun 2017, sedangkan penggunaan jenis kontrasepsi yang mengalami penurunan adalah MOW/MOP, AKDR/IUD, KB Suntikan dan susuk. Namun penggunaan alat kontrasepsi yang paling digemari oleh sebagian besar wanita yang berstatus kawin adalah KB Suntikan mencapai 50,22, diikuti oleh KB Pil sebesar 17,94 persen, dan KB lainnya sebesar 14,31 persen.

Banyaknya akseptor yang menggunakan KB suntikan bisa disebabkan karena alat/cara ini relatif lebih praktis dan mudah dilakukan begitu juga dalam hal pemberhentian bisa dilakukan pada saat yang dikehendaki oleh akseptor. Sementara itu, untuk penggunaan pil KB, hal ini sejalan dengan pemahaman masyarakat bahwa jenis kontrasepsi Pil KB pada dasarnya memiliki tingkat efektifitas tinggi untuk mencegah kehamilan. Akan tetapi, agak sulit dalam pemakaiannya karena faktor kesalahan manusia yang sering terjadi lupa minum pil KB.

Tabel 3.3
 Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun yang Kawin Menurut Jenis
 Alat Kontrasepsi yang digunakan Di Kota Makassar 2016 - 2017

Jenis Kontrasepsi	2016 (%)	2017 (%)
(1)	(5)	(3)
MOW/MOP	3,37	3,32
AKDR/IUD	14,66	9,16
Suntikan	55,59	50,22
Susuk	5,48	5,05
Pil	16,46	17,94
Lainnya	4,44	14,31

Sumber : BPS Kota Makassar ,Susenas 2016-2017

BAB IV KESEHATAN

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata, dengan harapan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Upaya perbaikan taraf kesehatan masyarakat dapat ditempuh melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang berkesinambungan baik dari segi mutu maupun jumlahnya, seperti rumah sakit, puskesmas, dokter dan tenaga medis lainnya. Pelayanan kesehatan diharapkan semakin baik dengan fasilitas kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat. Sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dengan mudah, murah dan merata.

Menurut perencanaan program dan dampaknya, indikator kesehatan terdiri dari indikator upaya perbaikan kesehatan dan status kesehatan, serta indikator penunjang. Indikator kesehatan tersebut yang dapat diturunkan dari data Susenas diantaranya adalah persentase persalinan ditolong tenaga medis, persentase bayi/balita diberi ASI, persentase keluhan kesehatan, dan jumlah hari sakit.

4.1. Status Kesehatan Masyarakat

Status kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat terutama dalam upaya preventatif. Pola hidup tersebut juga sangat tergantung pada perilaku dan pendapatan masyarakat. Pola hidup mengalami perubahan jika pendapatan cenderung tetap atau mengalami penurunan, di sisi lain pemenuhan kebutuhan semakin sulit dengan kenaikan harga secara terus menerus. Sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat menyebabkan terjadinya pergeseran pola makan yang secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kesehatan.

4.2. Keluhan Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah keadaan dimana seseorang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan dan hal lain, termasuk juga mereka yang menderita penyakit kronis dan belum sembuh.

Tabel 4.1 dari data Hasil Susenas 2017 menunjukkan bahwa penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 22,90 persen, naik jika dibandingkan tahun 2016 yang mengalami keluhan kesehatan mencapai 20,07 persen. Hal ini berarti masyarakat harus lebih memperhatikan dan menjaga kesehatan lebih baik lagi.

Tabel 4.1
Persentase Penduduk Kota Makassar yang Mengalami Keluhan Kesehatan di Kota Makassar 2016 - 2017

Tahun	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Laki-laki + Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	18,24	21,86	20,07
2017	21,29	24,47	22,90

Sumber: BPS Kota Makassar, Susenas 2016 - 2017

4.3. Lama Hari Sakit

Lama hari sakit dihitung menurut lama mengalami keluhan kesehatan yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Sedangkan jumlah hari sakit menggambarkan tingkat intensitas penyakit yang dialami penduduk. Selain itu, juga mencerminkan besarnya kerugian yang dialami penduduk karena penyakit yang diderita. Semakin banyak jumlah hari sakit semakin tinggi tingkat intensitas penyakit yang diderita penduduk dan semakin besar kerugian yang dialami.

Hasil Susenas 2017 di Kota Makassar menunjukkan bahwa dari semua penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang paling banyak adalah mereka yang mengalami keluhan kurang dari 4 hari yaitu sekitar 57,70 persen

pada tahun 2017. Jumlah hari sakit 4-7 hari sekitar 30,46 persen, 8-14 hari sekitar 3,89 persen, 15-21 hari sakit sebesar 3,17 persen, sedangkan yang mengalami keluhan kesehatan lebih 22-30 hari sebanyak 4,78 persen. Sebagian besar mengalami penurunan persentase hari sakit kecuali hari sakit kurang dari 4 hari naik sebesar 6,93 persen dan jumlah hari sakit 22-30 hari mengalami kenaikan sebesar 1,57 persen dibandingkan tahun 2016.

Tabel 4.2
 Persentase Penduduk Penderita Sakit menurut Jumlah Hari Sakit di Kota
 Makassar, 2016 – 2017

Jumlah Hari Sakit	2016			2017		
	L	P	L+ P	L	P	L+ P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
< 4	52,02	49,72	50,77	55,06	59,96	57,70
4 - 7	38,40	37,36	37,83	33,43	27,91	30,46
8 - 14	6,46	6,44	6,45	3,60	4,13	3,89
15 - 21	1,42	2,01	1,74	4,64	1,91	3,17
22 - 30	1,70	4,48	3,21	3,26	6,10	4,78

Sumber: BPS Kota Makassar, Susenas 2016 - 2017

4.4. Penolong Persalinan

Penolong persalinan berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan bayi dan ibu pada saat proses persalinan. Pemilihan penolong persalinan yang berkualitas tentunya lebih memungkinkan terwujudnya keselamatan/kesehatan bayi dan ibu pada saat persalinan. Tenaga medis sebagai penolong persalinan diyakini lebih baik dibandingkan tenaga non medis.

Penolong persalinan dapat dijadikan indikator bidang kesehatan terutama dalam kaitannya dengan kesehatan ibu dan anak serta mutu pelayanan kesehatan secara umum. Tempat persalinan yang khusus disertai dengan peralatan yang baik dan ditolong oleh petugas yang terampil, diperkirakan akan lebih baik bila dibandingkan dengan tempat bersalin di rumah, dengan peralatan sederhana dan ditolong oleh tenaga non medis.

Tabel 4.3

Persentase Perempuan Berumur 15-49 tahun yang pernah kawin menurut Penolong kelahiran anak yang terakhir di Kota Makassar 2016–2017

Tahun	Penolong persalinan Terakhir	
	Dokter Kandungan/ Dokter Umum	Bidan/ Paramedis/Lainnya
(1)	(2)	(3)
2016	52,87	47,13
2017	68,06	31,94

Sumber: BPS Kota Makassar, Susenas 2016–2017

Penolong persalinan di Kota Makassar selama kurun waktu 2016 – 2017 dengan pemanfaatan tenaga dokter sebagai penolong persalinan mengalami peningkatan menjadi 68,06 persen pada tahun 2017 dibanding tahun 2016, sedangkan pemanfaatan tenaga bidan, paramedis dan lainnya mengalami penurunan dari 47,13 persen pada tahun 2016 menjadi 31,94 persen di tahun 2017. Pada tahun 2017, penolong persalinan di Kota Makassar hanya dilakukan oleh dokter kandungan, dokter umum, dan bidan. Hal ini menunjukkan bahwa akses kesehatan di kota Makassar sudah cukup baik.

4.5. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

Sekarang ini pemerintah senantiasa mengaktualisasikan dan mensosialisasikan peningkatan pemanfaatan air susu ibu (ASI) bagi balita. Hal ini dikarenakan dalam pertumbuhan dan perkembangan balita sangat memerlukan air susu ibu (ASI). ASI merupakan zat makanan yang paling ideal untuk pertumbuhan bayi sebab selain bergizi juga mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh. Pemberian ASI kepada bayi akan memenuhi kebutuhan gizi dan memberikan kekebalan terhadap beberapa penyakit.

Pemberian ASI merupakan indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesadaran ibu terhadap kesehatan anak. Tabel 4.4 memperlihatkan

persentase anak usia 2-4 tahun yang pernah disusui menurut lamanya disusui di Kota Makassar.

Jika dilihat dari lamanya disusui pada balita (Tabel 4.4), nampak selama tahun 2017 persentase anak Usia 2- 4 tahun yang pernah disusui masih cukup tinggi yaitu sebesar 93,41 persen. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran penduduk akan pentingnya ASI bagi bayi.

Di Kota Makassar tahun 2017, persentase anak usia 2-4 tahun yang pernah disusui menurut lama disusui antara umur 1-12 bulan yaitu sekitar 66,10 persen, kemudian lamanya disusui umur 12-15 bulan sekitar 18,38 persen, lama disusui 16-19 bulan sekitar 8,20 persen, lama disusui 20-23 bulan sekitar 7,31 persen. Terlihat dari tabel 4.4 bahwa persentase bayi berusia dibawah 2 tahun yang paling banyak disusui yang berusia dibawah 1 tahun (12bulan) dan semakin bertambah usianya persentasenya semakin menurun dan paling sedikit di kelompok bayi berusia 20-23 bulan yang kemungkinan dibantu dengan susu formula.

Tabel 4.4
Persentase Anak Berusia Kurang dari 2 tahun yang pernah Disusui Menurut Lama Disusui Kota Makassar 2017

Lama Disusui (Bulan)	2016			2017		
	L(%)	P(%)	L+ P(%)	L(%)	P(%)	L+ P (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)
< 12	64,17	62,16	63.20	64,92	67,94	66,10
12-15	17,91	29,43	23.46	23,11	11,05	18,38
16-19	6,89	2,31	4.69	7,39	9,46	8,20
20-23	11,02	6,10	8.65	4,58	11,55	7,31

Sumber: BPS Kota Makassar, Susenas 2016–2017

4.6. Sarana Kesehatan

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat adalah penyediaan sarana kesehatan yang memadai. Dengan semakin meningkatnya sarana tersebut maka setiap warga masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mendapat pelayanan

kesehatan yang sebaik-baiknya. Puskesmas adalah satu unit pelayanan fungsional yang fungsi utamanya adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama. Wilayah kerjanya meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan atau sebagian dari kecamatan yang biasanya dibangun dengan melihat kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografi dan infrastruktur lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya tidak semua puskesmas dapat menjangkau semua penduduk yang dibebankan dalam wilayahnya, oleh sebab itu harus ditunjang dengan fasilitas layanan kesehatan lainnya. Fasilitas layanan kesehatan lainnya yang dimaksud adalah Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Posyandu. Keberadaan kedua fasilitas ini sangat membantu puskesmas dalam rangka memberikan pelayanan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Selain pengadaan fasilitas kesehatan, juga perlu ditunjang dengan kualitas pelayanan. Untuk itu keberadaan tenaga kesehatan yang berkualitas sangat diperlukan. Kualitas tenaga kesehatan sangat ditentukan oleh spesifikasi pendidikan yang dimiliki yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang akan diberikan pada masyarakat.

Tabel 4.5

Banyaknya Sarana Kesehatan menurut Jenisnya di Kota Makassar 2016 - 2017

Sarana Kesehatan	2017
(1)	(2)
1. Rumah Sakit	25
2. RS. Bersalin/RSIA	24
3. Puskesmas	46
5. Balai pengobatan/ klinik	223

Sumber : Dinkes Kota Makassar (Makassar Dalam Angka 2017)

BAB V PENDIDIKAN

Sumber daya manusia sangat penting peranannya dalam proses pembangunan. Untuk itu, pembangunan yang dilakukan bermuara pada pembangunan manusia. Salah satu komponen dalam pembangunan manusia adalah peningkatan di bidang pendidikan karena merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Program pendidikan mempunyai andil yang sangat besar terhadap kemajuan sosial ekonomi bangsa. Pembangunan pendidikan pada dasarnya dilakukan dalam empat strategi pokok yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan dan efisiensi pengelolaan.

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah, penambahan tenaga pengajar. Relevansi pendidikan melalui konsep “link and match”, yaitu relevansi strategi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Pendidikan hendaknya menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai tuntutan zaman. Dan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan supaya pendidikan diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan keadaan bidang pendidikan secara umum di Kota Makassar diantaranya adalah kemampuan membaca dan menulis, partisipasi sekolah, pendidikan yang ditamatkan, dan ketersediaan sarana pendidikan.

5.1. Sarana Pendidikan

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan penting untuk terus diupayakan sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah penduduk dan diberlakukannya program wajib belajar 9 tahun. Upaya ini ditujukan agar pelayanan pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan menuju standar yang diharapkan. Ketersediaan sarana pendidikan yang paling

dasar dapat ditunjukkan melalui indikator rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah. Meski memiliki kelemahan, yakni indikator bersifat kuantitatif bukan kualitatif, perubahan yang terjadi dalam indikator ini diharapkan dapat memberikan gambaran kemajuan pembangunan sarana pendidikan.

5.2. Rasio Murid Guru

Rasio murid Guru (RMG) merupakan perbandingan jumlah murid dengan jumlah guru pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Rasio murid guru menggambarkan rata-rata banyaknya murid yang diajar oleh seorang guru. Kelihatannya ada kecenderungan makin sedikit murid yang ditangani seorang guru semakin baik proses belajar mengajar. Hal ini karena guru dengan mudah memantau murid yang diajar dalam kelas, juga mudah mengukur prestasi belajar setiap siswa. Meskipun demikian, belum ada patokan tentang rasio murid guru yang ideal dalam proses belajar mengajar.

Tabel 5.1

Rasio Murid Guru di Kota Makassar Tahun Ajaran 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017

Jenjang Pendidikan	Rasio Murid- Guru		
	2014/2015	2015/2016	2016/2017
(1)	(2)	(3)	(4)
S D/Sederajat	21	21	22
S M P/ sederajat	14	18	19
S MA/Sederajat	11	16	17

Sumber :Data Dapodikdasmn Kota Makassar (Makassar Dalam Angka 2017)

Tabel 5.1 secara umum rasio murid (RMG) terhadap gurumenunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah atas sudah semakin baik. Rasio murid guru pada jenjang pendidikan SD/sederajat pada tahun ajaran 2017/2017 yaitu 21 yang menunjukkan bahwa setiap guru mengajar sekitar 21 murid. Selanjutnya RMG pada jenjang pendidikan SMP /sederajat sekitar 14 atau terdapat sekitar 14 murid diajar oleh seorang guru. Sementara itu, RMG pada jenjang pendidikan SMA/sederajat sekitar 11 atau terdapat sekitar 11 murid diajar oleh seorang guru.

5.3. Rasio Murid Sekolah

Rasio murid sekolah (RMS) pada setiap jenjang pendidikan diperoleh dengan membandingkan jumlah murid dengan jumlah sekolah. Rasio murid sekolah menggambarkan rata-rata banyaknya murid pada setiap sekolah dalam setiap jenjang pendidikan. Rasio ini diperlukan untuk mengetahui kepadatan murid pada setiap sekolah yang salah satu kegunaannya adalah untuk melihat layak tidaknya menambah gedung sekolah di suatu wilayah.

Rasio murid sekolah (RMS) untuk semua jenjang pendidikan sekolah di Kota Makassar pada tahun ajaran 2017/2017 menunjukkan angka yang tinggi dibanding tahun ajaran sebelumnya. Pada tahun ajaran 2017/2017 RMS pada jenjang SD/ sederajat sebanyak 301 murid per sekolah kemudian untuk jenjang SMP/ sederajat sebanyak 319 murid per sekolah dan untuk rasio murid sekolah pada jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat SMA/ sederajat sebanyak 467 murid/ siswa setiap sekolah.

Besarnya rasio murid sekolah pada setiap jenjang pendidikan sekolah menunjukkan adanya indikasi semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Hal ini tentunya sangat beralasan sekali karena hampir seluruh aspek kehidupan memerlukan pendidikan yang memadai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2
Rasio Murid Sekolah di Kota Makassar Tahun Ajaran 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017

Jenjang Pendidikan	Rasio Murid- Sekolah		
	2014/2015	2015/2016	2016/2017
(1)	(2)	(3)	(4)
S D/ Sederajat	301	299	267
S M P/ Sederajat	319	321	290
S M A/ Sederajat	467	307	306

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Data Dapodikdasmn, 2017

Rentang rasio murid sekolah tingkat SD berada pada kisaran terendah 231 di Kecamatan Bontoala hingga tertinggi 375 di kecamatan Biringkanaya. Sedangkan pada tingkat SMP, rasio murid sekolah terendah 147 di kecamatan Makassar dan tertinggi 494 di kecamatan Mamajang. Pada tingkat SMA, rasio murid sekolah terendah 270 di kecamatan Bontoala dan tertinggi 621 di kecamatan Biringkanaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 5.3 dan 5.4

Tabel 5.3
Rasio Murid Sekolah dan Rasio Murid Guru Menurut Kecamatan di Kota Makassar 2016/2017

Kecamatan	SD		SMP		SMA/SMK	
	Rasio Murid Sekolah	Rasio Murid Guru	Rasio Murid Sekolah	Rasio Murid Guru	Rasio Murid Sekolah	Rasio Murid Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Mariso	210	22	476	12	417	17
02. Mamajang	307	22	499	22	339	17
03. Tamalate	251	24	321	19	451	19
04. Rappocini	270	20	304	16	135	14
05. Makassar	260	23	168	15	71	9
06. UjungPandang	288	19	351	17	372	18
07. Wajo	273	20	217	19	204	17
08. Bontoala	204	21	160	18	240	17
09. Ujung Tanah	218	24	288	23	378	21
10. Tallo	273	25	255	21	334	17
11. Panakkukang	261	20	228	19	221	17
12. Manggala	316	21	372	19	380	17
13. Biringkaya	269	24	280	18	483	18
14. Tamalanrea	313	21	354	18	350	17
J u m l a h	267	21	290	17	300	17

Sumber :Data Dapodikdasmen Kemendikbud

Tabel 5.4
Jumlah Murid, Guru dan Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Makassar 2017

Kecamatan	SD			SMP			SMA/SMK		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01. Mariso	19	5039	233	6	2516	121	7	2956	169
02. Mamajang	25	8108	358	10	4958	222	15	4646	295
03. Tamalate	44	13812	597	15	6549	368	27	9468	565
04. Rappocini	50	12686	670	20	5525	371	25	6069	487
05. Makassar	39	10773	487	18	2654	179	16	2664	242
06. Ujung Pandang	33	9135	505	19	6076	370	13	4809	293
07. Wajo	13	3266	171	6	1519	72	5	1041	70
08. Bontoala	24	5552	267	13	2253	128	13	4493	265
09. Ujung Tanah	21	5823	231	11	3143	132	6	1872	113
10. Tallo	46	14856	586	15	4748	243	7	2994	207
11. Panakkukang	51	14301	781	18	4213	212	26	6855	415
12. Manggala	39	13598	635	16	7026	357	19	5422	361
13. Biringkaya	51	18878	841	24	9817	551	21	8179	488
14. Tamalanrea	35	10911	523	13	4479	254	14	4304	258
Jumlah	490	146738	6885	204	65476	3580	214	65772	4228

Sumber : Data Dapodikdasmen Kemendikbud

Tingginya rasio murid sekolah, seyogyanya dapat diantisipasi dengan memperbanyak sarana dan fasilitas ruang kelas di masing-masing sekolah. Demikian juga dengan ketersediaan tenaga pengajar di tingkat SD utamanya daerah-daerah terpencil dan daerah sulit, sangat perlu dilakukan penambahan dan redistribusi sehingga diperoleh keseimbangan rasio murid guru. Namun untuk tingkat SMP dan SMA rasio murid guru sudah baik. Dengan demikian harapan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dapat dicapai.

5.4. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan proporsi penduduk kelompok usia tertentu yang masih duduk di bangku sekolah. Indikator ini menunjukkan keadaan proses pendidikan yang diimplementasikan di masyarakat. Angka partisipasi sekolah yang disajikan dalam bab ini menunjukkan perbandingan antara banyaknya murid pada suatu jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

Tabel 5.5
Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun, 13-15 Tahun dan 16-18 Tahun
Kota Makassar 2016 – 2017

Jenis Kelamin	2016			2017		
	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	97,78	96,43	70,62	98.85	92.41	75.68
Perempuan	99,38	96,87	75,66	98.18	91.71	71.89
Laki-laki + Perempuan	98,64	96,65	73,26	98.29	92.05	74.06

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2016 – 2017

Tabel 5.5 memperlihatkan angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun di Kota Makassar. Tampak pola partisipasi sekolah penduduk Kota Makassar yang menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan semakin kecil partisipasi sekolahnya. Keadaan ini terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan.

Partisipasi sekolah dari penduduk usia 7-12 tahun di tahun 2017 mencapai 98,29 persen, ini dapat diartikan dari 100 penduduk usia 7-12 tahun ada sekitar 98 penduduk yang masih aktif bersekolah. Untuk penduduk usia ini, partisipasi sekolah penduduk perempuan besar dari pada laki-laki yaitu sekitar 98,85 persen laki-laki dan perempuan sekitar 98,18 persen.

Pada kelompok umur 13-15 tahun, partisipasi sekolahnya lebih rendah dari partisipasi sekolah pada kelompok usia 7-12 tahun. Partisipasi sekolah pada kelompok ini mencapai sekitar 92,05 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, dimana partisipasi penduduk perempuan lebih tinggi dari laki-laki, yaitu 92,41 persen untuk perempuan dan 91,71 persen untuk laki-laki.

Pada kelompok umur 16-18 tahun, partisipasi sekolahnya juga nampak lebih rendah dibandingkan pada kelompok umur 13-15 tahun. Partisipasi sekolah pada kelompok ini mencapai 74,06 persen. Angka Partisipasi penduduk perempuan sebesar 71,89 persen, sedangkan partisipasi penduduk laki-laki sebesar 75,68 persen.

Pada table 5.5 kita bisa melihat bahwa partisipasi sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun diatas 90%. Tingginya angka partisipasi sekolah pada kelompok ini salah satunya disebabkan adanya program pendidikan gratis pada usia SD dan SMP yang sebagian besarnya berada dalam usia 7-12 dan 13-15 tahun. Sedangkan pada kelompok umur 16-18 tahun angka partisipasinya hanya berkisar pada angka 70-an persen.

5.5. Kemampuan Membaca dan Menulis (Tingkat Buta Huruf)

Kemampuan membaca dan menulis atau tingkat buta huruf terutama untuk penduduk yang berumur 10 tahun ke atas merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan program pembangunan di bidang pendidikan. Sebab kalau di suatu wilayah masih cukup banyak penduduk yang buta huruf, jelas merupakan indikator ketertinggalan, sebab seseorang yang buta huruf relatif akan lebih sulit untuk menerima informasi dan pengetahuan baru.

Kemampuan membaca dan menulis merupakan kebutuhan mendasar, tanpa kepandaian tersebut sulit rasanya untuk mengikuti perkembangan informasi sosial ekonomi global. Ukuran ini merupakan indikator dasar mutu sumber daya manusia yang di ukur dalam aspek pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin tinggi sumber daya manusia suatu masyarakat.

Melek huruf yang dimaksud adalah jika seseorang yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Yang dimaksud huruf lainnya misalnya huruf Arab, Bugis/Makasar, Jawa, Cina dan sebagainya. Sedangkan seseorang yang hanya dapat membaca atau menulis saja belum dianggap sebagai melek huruf.

Tabel 5.6 menunjukkan tingkat kemampuan baca dan tulis penduduk berumur 15 tahun ke atas. Secara umum, selama kurun 2016 – 2017 kemampuan dapat membaca dan menulis penduduk meningkat. Hal itu ditandai dengan meningkatnya persentase penduduk yang dapat membaca dan menulis baik huruf latin maupun huruf lainnya serta menurunnya angka buta huruf. Tahun 2017 sekitar 98,86 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis, atau naik sekitar 0,95 persen dari keadaan tahun 2016 yang mencapai 97,91 persen.

Telaah lebih lanjut berdasarkan jenis kelamin, nampak bahwa kemampuan membaca dan menulis penduduk perempuan lebih rendah dibanding penduduk laki-laki. Penduduk perempuan yang bisa membaca dan menulis sebesar 98,36 persen tahun 2017 dan penduduk laki-laki yang dapat membaca dan menulis sekitar 99,37 persen. Masih adanya penduduk yang buta huruf sebesar 1,14 persen. Penduduk yang buta huruf kemungkinan terjadi pada usia lanjut yang sudah enggan untuk belajar membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya. Kondisi ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 2,09 persen. Penurunan angka buta huruf ini bisa menjadi salah satu indikator semakin membaiknya kualitas pendidikan di Kota Makassar. Meskipun demikian, perhatian pemerintah terhadap kualitas pendidikan harus tetap ditingkatkan karena ada beberapa indikator pendidikan yang harus ditingkatkan kualitasnya.

Tabel 5.6
Kemampuan Baca Tulis Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kota Makassar
2016-2017

Jenis Kelamin	2016		2017	
	Dapat Membaca dan Menulis	Tidak Dapat	Dapat Membaca dan Menulis	Tidak Dapat
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
Laki-Laki	97,93	2,07	99.37	0.63
Perempuan	97,89	2,11	98.36	1.64
Laki-laki + Perempuan	97,91	2,09	98.86	1.14

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2016 – 2017

5.6. Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan/Dimiliki

Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Sehingga potensi sumber daya manusia di suatu wilayah dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Tabel 5.7 memperlihatkan penduduk Kota Makassar usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2016-2017. Bahwa sebagai ibukota propinsi pusat kegiatan ekonomi dengan fasilitas pendidikan yang lengkap, memungkinkan penduduknya untuk memperoleh pendidikan yang tinggi dengan lebih mudah. Pada tahun 2017 sebagian besar penduduk yang berusia 15 tahun ke atas berijazah SD, SLTP, SMA umum SMA Kejuruan masing-masing sebesar 14,07 persen; 17,60 persen; 35,14 persen dan 4,90 persen. Sementara penduduk Kota Makassar yang berijazah DIV/S1/S2/S3 sebesar 18,50 persen. Selengkapnya pada Tabel 5.7 dibawah ini.

Tabel 5.7

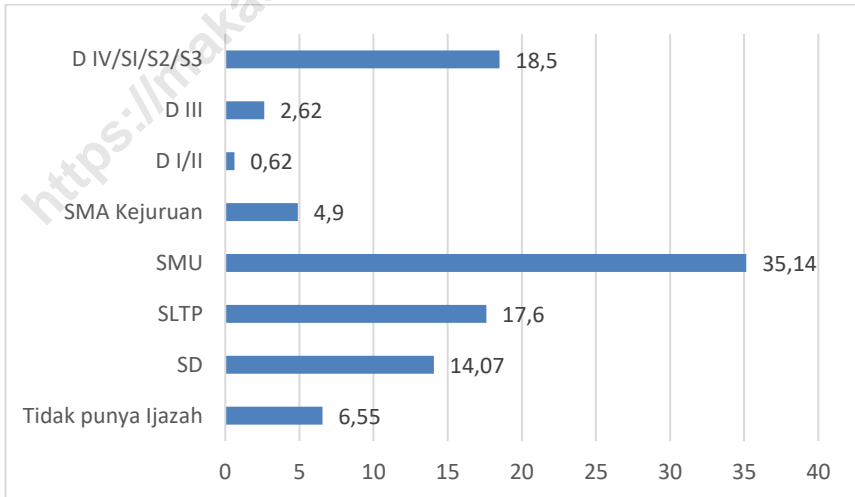
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Yang Ditamatkan di Kota Makassar Tahun 2017

Pendidikan Yang Ditamatkan	2017		
	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak punya Ijazah	5.26	7.81	6.55
SD	12.53	15.59	14.07
SLTP	17.88	17.33	17.60
SMU	34.98	35.30	35.14
SMA Kejuruan	5.89	3.92	4.90
D I/II	.48	.76	.62
D III	1.76	3.46	2.62
D IV/SI/S2/S3	21.22	15.83	18.50

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2017

Grafik 4

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2017



BAB VI

KETENAGAKERJAAN

Berbicara mengenai pembangunan tentu tercakup didalamnya tentang tenaga kerja. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu hal penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin. Masalah yang timbul dalam ketenagakerjaan baik ditingkat nasional maupun regional adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan kesempatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja dari waktu ke waktu masih cukup tinggi, sementara pertumbuhan kesempatan kerja cukup rendah, akibatnya menimbulkan pengangguran, dan arus urbanisasi ke kota besar yang jelas-jelas tidak diinginkan oleh berbagai pihak. Dengan demikian pemerintah perlu strategi pembangunan yang berorientasi pada perluasan/pembukaan kesempatan kerja. Kemudian sejauhmana pemerintah mengambil strategi seperti itu dan menjalankannya seefektif mungkin, telah dianggap sebagai salah satu langkah yang penting artinya bagi keberhasilan pembangunan.

Secara internasional berdasarkan konsep dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, penduduk usia 15-64 tahun dikelompokkan sebagai tenaga kerja (Man Power), sedangkan di Indonesia menggolongkan penduduk usia 15 tahun keatas sebagai tenaga kerja. Batasan ini didasarkan pada kenyataan terdapat banyak penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja.

Melalui konsep Labour Force Approach dari bagian penduduk, tenaga kerja dapat digolongkan mereka yang termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja adalah mereka yang bekerja (untuk menghasilkan barang dan jasa) maupun yang belum (sedang mencari pekerjaan). Tenaga kerja yang tidak termasuk angkatan kerja yaitu mencakup mereka yang sedang bersekolah, mengurus rumahtangga, tidak mampu melakukan kegiatan dan lainnya.

Informasi ketenagakerjaan sangat penting terutama untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan diharapkan tidak hanya mengatasi masalah pengangguran tetapi juga sekaligus meningkatkan

taraf kesejahteraan para tenaga kerja dan peningkatan produktifitas secara makro. Dalam ketenagakerjaan dikenal berbagai indikator seperti tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), Tingkat pengangguran (TP), distribusi pekerja menurut sektor usaha.

6.1. Penduduk Menurut Jenis Kegiatan

Tabel 6.1 menyajikan persentase penduduk usia 15 tahun keatas menurut kegiatan utama selama seminggu yang lalu di Kota Makassar tahun 2017. Tabel ini menunjukkan bahwa dari seluruh penduduk angkatan kerja ada sebanyak 49,38 persen penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja dan sebanyak 5,85 persen yang sedang mencari pekerjaan. Dibanding tahun 2015 angkatan kerja yang bekerja mengalami kenaikan sebesar 0,81 persen.

Tabel 6.1

Penduduk usia 15 tahun keatas menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu Yang Lalu, Di Kota Makassar, 2015 dan 2017

Tahun	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja		
	Bekerja	Mencari Kerja	Sekolah	Mengurus Rumah tangga	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2015	48,57	6,64	19,19	20,55	5,05
2017	49,38	5,85	12,53	27,24	5,00

Sumber : BPS Kota Makassar, Sakernas 2015 dan 2017

6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu ukuran yang dapat menggambarkan partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. TPAK merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15 tahun keatas).

Tabel 6.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Usia 15 tahun Keatas Di Kota Makassar 2015 dan 2017

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)	
	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	70,22	40,84	12,35	11,49
2017	72,90	38,28	9,57	12,45

Sumber : BPS Kota Makassar, Sakernas 2015 dan 2017

Dari tabel 6.2 disajikan indikator ketenagakerjaan pada tahun 2015 dan 2017. Pada rentang waktu tersebut menunjukkan trend penurunan TPAK baik untuk laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2017 TPAK penduduk laki-laki Kota Makassar sebesar 72,90 yang berarti dari 100 orang yang usia kerja sebanyak 70 orang penduduk laki-laki yang masuk sebagai angkatan kerja sedangkan sisanya sebagai penduduk bukan angkatan kerja. Sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 38,28.

Seperti di negara-negara berkembang, pengangguran masih menjadi persoalan ekonomi di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh tidak terserapnya sebagian angkatan kerja dalam sektor kegiatan ekonomi (lapangan pekerjaan). Dengan kata lain pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan lapangan kerja baru. Sehingga sangat diperlukan data mengenai pencari pekerjaan sebagai bahan untuk pertimbangan mengenai masalah ketenagakerjaan. Selanjutnya bagian dari angkatan kerja yang saat ini tidak bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan, dapat diartikan pula sebagai tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Tingkat pengangguran pada tahun 2015-2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 TPT laki-laki turun sebesar 2,78 persen dibanding tahun 2015, sedangkan TPT perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,96 persen. Kondisi perekonomian yang tidak stabil saat ini turut mempengaruhi angka TPAK dan

TPT di Kota Makassar, sehingga masalah pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama.

6.3. Lapangan Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan

Aktifitas ekonomi suatu wilayah dapat ditunjukkan melalui distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha.

Tabel 6.3 memperlihatkan bahwa aktifitas ekonomi penduduk Kota Makassar terkonsentrasi pada sektor perdagangan dan jasa. Pada tahun 2017, sektor perdagangan menyerap tenaga kerja sebesar 195.155 orang di kota Makassar dan sektor jasa kemasyarakatan sebesar 151.428 pekerja. Selama tahun 2017 alokasi lapangan usaha sebagai tanda aktifitas ekonomi di Kota Makassar nampak terjadi pergeseran, meski sektor perdagangan dan jasa masih mendominasi. Pada sektor perdagangan besar, eceran menyerap 195.155 tenaga kerja, sedangkan sector jasa menyerap tenaga kerja sebanyak 151.428 tenaga kerja. Ini menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen tenaga kerja di Makassar terserap pada kedua sektor tersebut.

Tabel 6.3
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kota Makassar 2017

Lapangan Pekerjaan Utama	2017		
	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan perikanan	17.007	1.300	18.307
Industri Pengolahan	34.762	17.448	52.210
Perdagangan Besar, Eceran,	101.749	93.406	195.155
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	91.374	60.054	151.428
Lainnya *)	113.505	17.763	131.268

Sumber : BPS Kota Makassar, Sakernas 2015 dan Sakernas 2017

Catatan: Lainnya*) Pertambangan dan Penggalian, Bangunan, Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan

Tabel 6.4
Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama seminggu
Yang Lalu menurut Jenis Pekerjaan Kota Makassar, 2017

Jenis Pekerjaan	2017		
	L	P	L+P
(1)	(5)	(6)	(7)
Tenaga Profesional	51.567	29.256	80.823
Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	30.348	29.189	59.537
Tenaga Tata Usaha dan sejenisnya	13.602	5.348	18.950
Tenaga Usaha Penjualan	37.368	26.755	64.123
Tenaga Usaha Jasa	59.836	65.190	125.026
Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	8.967	-	8.967
Tenaga Produksi, Operator alat-alat angkutan dan Pekerja Kasar	156.709	34.233	190.942

Sumber : BPS Kota Makassar, Sakernas 2017

Berdasarkan tabel 6.4 terjadi pergeseran usia 15 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan jenis pekerjaan di Kota Makassar pada tahun 2017. Pada tahun 2017, 3 jenis pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling besar adalah jenis pekerjaan tenaga produksi, operator alat-alat berat yaitu sebesar 190.942 pekerja; jenis pekerjaan tenaga usaha jasa sebesar 125.026 pekerja dan tenaga profesional sebanyak 80.823 tenaga kerja.

6.4. Status Pekerjaan

Indikator ketenagakerjaan lainnya yang menunjukkan tingkat kesejahteraan adalah status pekerjaan penduduk, yakni kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha. Status pekerjaan dibedakan menjadi tujuh kategori, yakni berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non pertanian dan pekerja keluarga. Status

pekerjaan ini dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui status pekerjaan formal dan informal. Indikasi berkembangnya sektor informal dapat dilihat melalui peningkatan jumlah pekerja dengan status berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga dan pekerja bebas.

Pada Tabel 6.5 berikut ini, memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 2017, status pekerjaan utama sebagai buruh/karyawan/pegawai masih mendominasi status pekerjaan utama penduduk Kota Makassar. Dari 548.368 penduduk 15 Tahun Kota Makassar yang bekerja, sebanyak 342.757 (62,50 %) yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Terbanyak kedua adalah status pekerjaan berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain sebanyak 113.456 (20,69 %). Selebihnya, sebanyak 16,81 persen penduduk 15 tahun keatas Kota Makassar pada tahun 2017 ini bekerja dengan status pekerjaan utamanya adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, pekerja bebas dan pekerja yang tidak dibayar.

Tabel 6.5
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu
Menurut Status Pekerjaan Kota Makassar, 2017

Status Pekerjaan Utama	2017		
	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain	69.335	44.121	113.456
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar	10.159	14.887	25.046
Berusaha dibantu buruh tetap	23.853	7.003	30.856
Buruh/karyawan/pegawai	233.046	109.711	342.757
Pekerja bebas di pertanian	2.745	-	2.745
Pekerja bebas di non pertanian	7.514	997	8.511
Pekerja tak dibayar	11.745	13.252	24.997
Jumlah	358.397	189.971	548.368

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Sakernas 2017

6.5. Lama Jam Bekerja

Salah satu ukuran untuk menentukan bagaimana produktifitas pekerja dan ukuran setengah pengangguran dan tenaga kerja penuh adalah jumlah jam bekerja yang digunakan pekerja untuk bekerja dalam seminggu. Batasan yang biasanya dipakai untuk mengukur jam kerja adalah lebih 35 jam/minggu, artinya jika yang bekerja kurang dari jam kerja normal dikatakan sebagai pekerja penganggur/setengah bekerja. Pada tabel 6.6 tampak bahwa 450.679 orang penduduk Kota Makassar yang bekerja selama 35 jam keatas dalam seminggu yakni 285.517 orang laki-laki dan 165.162 orang perempuan pada tahun 2017.

Tabel 6.6
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang
Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya di Kota Makassar, 2016

Jumlah Jam Kerja Seluruhnya	2016		
	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
0	7.616	10.772	18.388
1 – 14	13.587	14.636	28.223
15 – 34	25.898	26.978	52.876
35 +	311.296	137.585	448.881
Jumlah	358.397	189.971	548.368

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Sakernas 2017

BAB VII

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping sandang dan pangan. Rumah selain berfungsi sebagai tempat istirahat atau berlindung dari hujan dan panasnya matahari, juga berfungsi sebagai tempat untuk membina kehidupan rumah tangga dan bersosialisasi antar individu dalam rumah dan mengembangkan diri. Pemerintah telah berupaya untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan rumah melalui berbagai program diantaranya menyediakan fasilitas kredit kepemilikan rumah (KPR).

Rumah dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur tingkat sosial masyarakat dan keberhasilan pembangunan di bidang perumahan. Keberadaan rumah yang dimaksud tidak saja menyangkut kuantitas tetapi juga mengenai kualitas rumah. Kondisi fisik bangunan menunjukkan kualitas dan kuantitas tempat tinggal yang dikuasai. Fisik bangunan yang kuat dan terbuat dari bahan yang tidak membahayakan menjamin keamanan penghuni tidak saja dari ancaman tindak kriminal, tetapi juga dari kerentanan bangunan itu sendiri dan kemungkinan terserang penyakit. Fisik bangunan yang kuat ditentukan oleh pemilihan bahan komponen bangunan yaitu lantai, dinding, dan atap. Fasilitas rumah yang tidak memadai dan kondisi lingkungan yang tidak sehat juga akan berpengaruh terhadap kesehatan.

7.1. Status Penguasaan Rumah

Indikator ini memperlihatkan status penguasaan rumah yang dibedakan atas milik sendiri, kontrak, sewa, rumah dinas, bebas sewa dan lainnya. Pada umumnya rumahtangga yang memiliki tempat tinggal sendiri, diperkirakan tingkat kesejahteraannya lebih baik, dibanding mereka yang masih kontrak, sewa atau lainnya. Semakin tinggi persentase rumahtangga yang menempati tempat tinggal sendiri disuatu daerah, akan semakin baik tingkat kesejahteraan daerah tersebut.

Tabel 7.1 memperlihatkan status penguasaan bangunan tempat tinggal oleh rumahtangga di Kota Makassar pada tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2017, penguasaan bangunan tempat tinggal dengan status milik sendiri sebesar 56,65 persen, kontrak/sewa sebesar 23,65 persen dan bebas sewa/dinas/lainnya sebesar 19,57 persen.

Penguasaan tempat tinggal bukan milik sendiri oleh rumahtangga dipengaruhi beberapa faktor antara lain; keadaan ekonomi dan sosial masyarakat yaitu rendahnya pendapatan, alasan pendidikan, lokasi tempat kerja dan memilih tinggal bersama keluarga/sanak saudara.

Tabel 7.1
Rumah tangga menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Kota Makassar, 2016– 2017

Status Penguasaan	2016 (%)	2017 (%)
(1)	(2)	(3)
Milik Sendiri	63,10	56,65
Kontrak/Sewa	18,57	23,78
Bebas Sewa/Dinas/Lainnya	18,33	19,57

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2016– 2017

7.2. Kondisi Fisik Bangunan Tempat Tinggal

Kenyamanan tempat tinggal tidak bisa dipisahkan dari luas lantai dan jenis bahan bangunan, makin luas lantai hunian diimbangi dengan kualitas bahan bangunan yang digunakan makin baik pula kesejahteraan penghuninya. Luas lantai dan jenis bahan bangunannya, merupakan unsur penting dalam menciptakan kondisi kenyamanan dan kesehatan bagi penghuninya. Diperkirakan semakin luas lantai hunian dan semakin baik kualitas bahan

bangunan yang digunakan akan menciptakan kondisi, yang semakin nyaman dan sehat bagi penghuninya.

Rata- rata luas lantai per anggota rumahtangga akan memberikan gambaran tentang tingkat kenyamanan suatu rumah bagi penghuninya. Jika rata-rata anggota rumahtangga di Kota Makassar berkisar antara 4 sampai 5 orang, dan standar normatif luas lantai perkapita seluas 8 m² maka luas lantai hunian yang diharapkan setiap rumahtangga adalah berkisar antara 32 – 40 m².

Keadaan rumahtangga menurut luas lantai bangunan tempat tinggal selama tahun 2017 menunjukkan bahwa rumahtangga yang menempati rumah dengan luas lantai kurang dari 20 meter persegi sekitar 11,92 persen. Selanjutnya rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai 20-49 m² sekitar 22,42 persen. Sementara itu, rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai 50-99 m², yakni mencapai 33,42 persen, sedangkan rumahtangga dengan luas lantai 100 m² keatas mencapai 32,24 persen.

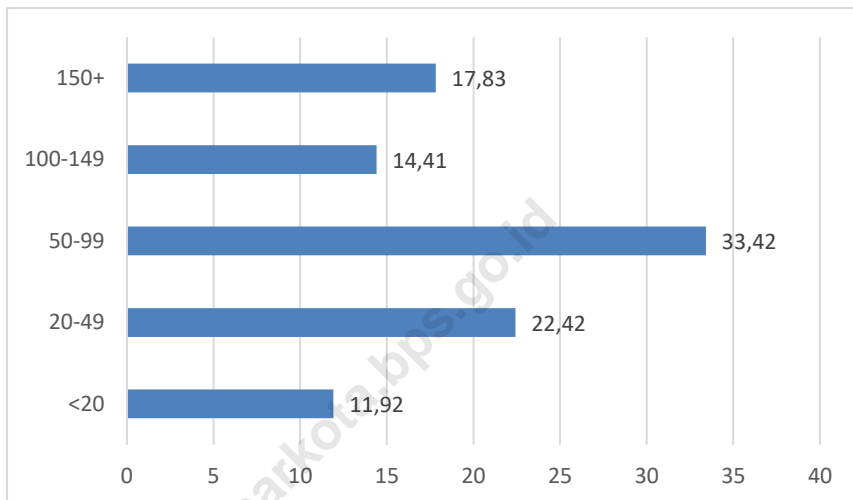
Dengan melihat kondisi luas lantai bangunan tempat tinggal di kota Makassar, tampaknya masih perlu perhatian dari pihak terkait yang ditujukan terutama bagi rumahtangga yang menempati bangunan luas lantai yang belum memadai.

Tabel 7.2
Persentase Rumahtangga menurut Luas Lantai di Kota Makassar Tahun 2016 dan 2017

Luas Lantai	2016 (%)	2017 (%)
(1)	(2)	(3)
- < 20	7.87	11,92
- 20 – 49	23.62	22,42
- 50 – 99	33.21	33,42
- 100 – 149	15.74	14,41
- 150 +	19.56	17,83

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2016 dan 2017

Grafik 5
Persentase Rumahtangga Menurut Luas Lantai Kota Makassar
Tahun 2017

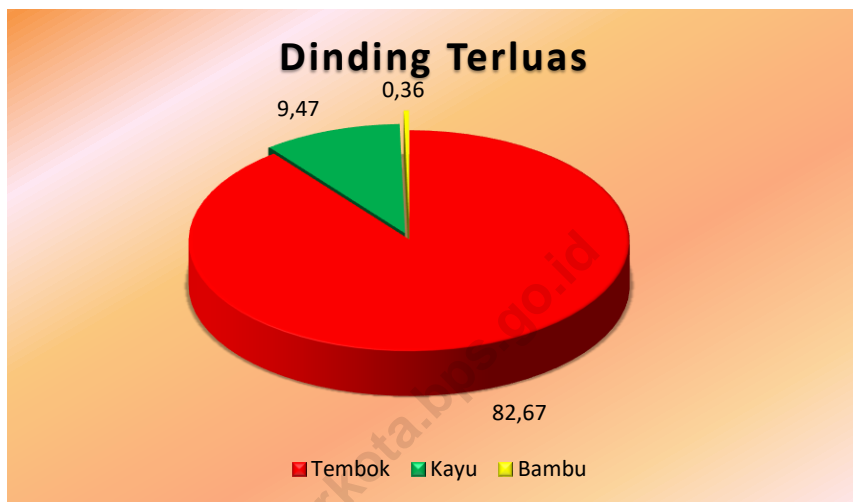


Tabel 7.3
Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Kota
Makassar Tahun 2017

Jenis Dinding	2016 (%)	2017 (%)
(1)	(2)	(3)
- Tembok	77,00	82,67
- Kayu	7,50	9,47
- Bambu	0,62	0,36
- Seng/Lainnya	14,88	-

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2017

Grafik 6
Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Dinding Terluas Di Kota Makassar
Tahun 2017



Keadaan rumahtangga menurut dinding terluas tahun 2016 dan 2017 disajikan pada tabel 7.3. Pada tabel ini jenis dinding terluas dibagi dalam empat kelompok, yaitu jenis dinding tembok, kayu, bambu dan lainnya. Tabel 7.3 menunjukkan sebagian besar jenis dinding terluas yang dihuni oleh rumah tangga sudah berupa tembok, yaitu sebesar 82,67 persen, berupa kayu sebesar 9,47 persen dan berupa bambu 0,36 persen. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar dinding terluas di setiap rumahtangga di Kota Makassar sudah merupakan dinding yang permanen karena berupa tembok.

Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga seseorang yang mendiami terlindung dari terik sinar matahari, hujan dan sebagainya. Untuk jenis bangunan bertingkat, yang dimaksud atap disini adalah bagian yang paling atas dari bangunan tersebut.

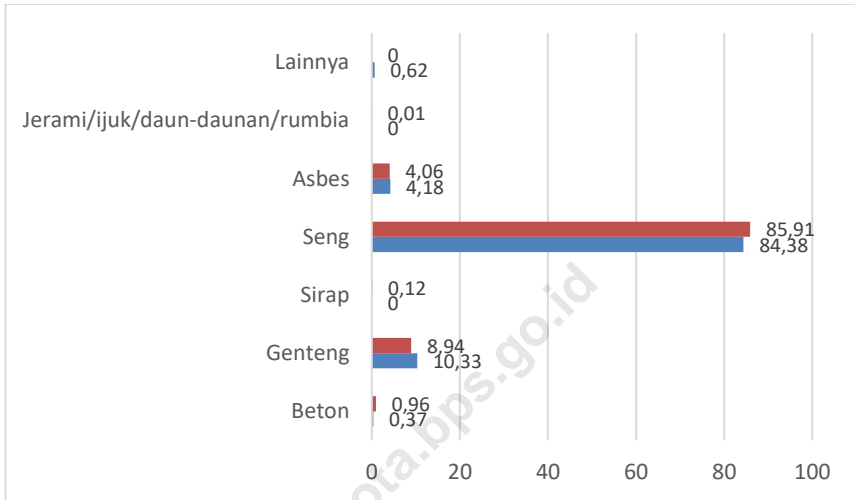
Pada tahun 2017 sebagian besar rumahtangga sudah menempati bangunan tempat tinggal dengan atap seng sebagai atap terluas, yakni mencapai 85,91 persen naik 1,53 persen dari tahun 2016.

Tabel 7.4
 Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kota
 Makassar Tahun 2016 - 2017

Jenis Atap	2016 (%)	2017 (%)
(1)	(2)	(3)
- Beton	0,37	0,96
- Genteng	10,33	8,94
- Sirap	0,00	0,12
- Seng	84,38	85,91
- Asbes	4,18	4,06
- Jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia	0,00	0,01
- Lainnya	0,62	0,00

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2016 - 2017

Grafik 7
Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kota Makassar Tahun 2016 dan 2017



Persyaratan lain dari rumah sehat, oleh Depkes adalah lantai rumah harus kering / tidak lembab. Oleh karena itu bahan penutup lantai harus terbuat dari teraso, ubin/tegel, batu bata, atau plur/semen (untuk rumah bukan panggung/tingkat) dan terbuat dari kayu atau bambu (untuk rumah panggung).

7.3. Fasilitas Tempat Tinggal

7.3.1. Sumber Air Minum

Kenyamanan tempat tinggal juga tidak bisa dipisahkan dari kelengkapan, kelayakan dan penggunaan fasilitas tempat tinggal. Air merupakan kebutuhan yang vital, dibutuhkan oleh setiap orang. Air digunakan untuk minum, mandi dan mencuci. Sehat atau bersih tidaknya air yang digunakan akan bergantung pada sumbernya. Penggunaan air bersih dan pemilikan fasilitas air minum dapat dijadikan indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan. Semakin banyak rumahtangga yang memanfaatkan air bersih, menunjukkan semakin baiknya kondisi kesehatan rumahtangga. Demikian halnya dengan semakin

banyaknya rumahtangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri cenderung semakin baik tingkat kesejahteraannya. Air minum yang dianggap memenuhi syarat kesehatan adalah yang bersumber dari ledeng. Karena sebelum air didistribusikan ke rumah penduduk terlebih dahulu dilakukan proses penjernihan. Selain itu yang termasuk kategori air bersih adalah air yang bersumber dari pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Kebutuhan akan air bersih, terutama untuk bahan baku air yang berkualitas, bila ditinjau dari segi kesehatan dirasakan semakin hari semakin penting. Ini mengingat semakin tingginya permintaan akan air bersih oleh rumahtangga, yang tidak dapat diimbangi penyediaannya oleh alam secara memadai, mengingat daya dukung sumber daya yang terbatas.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat sumber air minum yang dikonsumsi rumahtangga adalah dengan melihat sumber air minum yang digunakan oleh rumahtangga tersebut.

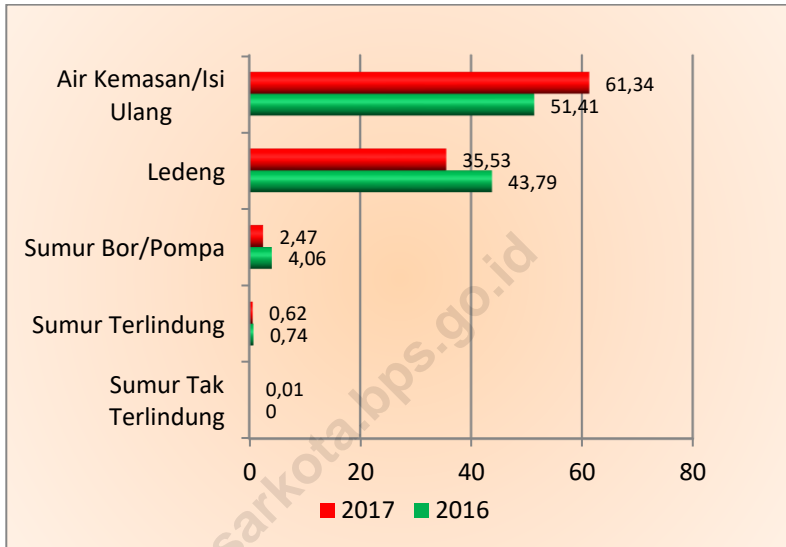
Rumahtangga di Kota Makassar tahun 2017 yang menggunakan air dalam kemasan/air isi ulang dan Air Ledeng (PDAM) sebagai sumber air minum utama menempati urutan pertama dan kedua sebagai sumber air minum yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dengan masing-masing persentasenya sebesar 61,34 persen dan 35,53 persen. Sedangkan yang menggunakan air sumur bor/pompa sebagai sumber air minum yaitu sekitar 2,47 persen, air sumur terlindung sekitar 0,62 persen dan sumur tak terlindung sekitar 0,01persen.

Tabel 7.5
 Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota
 Makassar Tahun 2016-2017

Sumber Air Minum (1)	2016 (3)	2017 (5)
- Air dalam kemasan/Isi Ulang	51,41	61,34
- Ledeng	43,79	35,53
- Sumur bor/pompa	4,06	2,47
- Sumur terlindung	0,74	0,62
- Sumur tak terlindung/Lainnya	0,00	0,01

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2016-2017

Grafik 8
Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota
Makassar Tahun 2016 dan 2017



7.3.2. Fasilitas Buang Air Besar

Fasilitas buang air besar merupakan salah satu fasilitas tempat tinggal yang sangat penting, karena berhubungan erat dengan sanitasi lingkungan tempat tinggal, terutama berupa penggunaan kloset dan tempat penampungan akhir kotoran/tinja. Fasilitas buang air besar yang dianggap memenuhi syarat kesehatan adalah kakus yang menggunakan kloset leher angsa atau plengsengan dengan penampungan akhir berupa tangki septik. Tangki septik dapat mencegah limbah untuk tidak mencemari lingkungan terutama air sumur yang dibuat/berada di sekitar tempat tersebut.

Dari tabel 7.6 dapat dilihat bahwa persentase rumahtangga dalam menggunakan tempat buang air besar dengan fasilitas tempat buang air besar digunakan oleh rumahtangga itu sendiri tahun 2016 sebesar 82,04 persen dan 83,69 persen tahun 2017, sedangkan untuk fasilitas tempat

buang air besar rumahtangga yang digunakan bersama pada tahun 2016 sebesar 13,28 persen dan 13,76 persen tahun 2017. Selebihnya untuk fasilitas tempat buang air besar yang digunakan oleh rumanhtangga dengan fasilitas buang air besar ditempat umum sebesar 1,97 persen di tahun 2016 dan di tahun 2017 0,68 persen.

Tabel 7.6
Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat
Buang Air dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja Di Kota
Makassar Tahun 2016- 2017

Fasilitas Tempat Tinggal	2016 (%)	2017 (%)
(1)	(2)	(3)
Fasilitas Tempat BAB		
- Sendiri	82,04	83,69
- Bersama/Komunal	13,28	13,76
- Umum	2,71	1,87
- Tidak ada	1,97	0,68
Tempat Pembuangan Akhir Tinja		
- Tangki/SPAL	95,94	98,97
- IPAL	-	0,38
- Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut	0,62	0,51
- Lubang Tanah/ Pantai/Tanah Lapang/Kebun/Lainnya	3,44	0,14

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2016 dan 2017

7.3.3. Fasilitas Penerangan

Fasilitas listrik juga banyak memberikan efisiensi dan produktivitas pada pemakaian sebagai sumber penerangan. Pada tabel 7.7 untuk sumber penerangan sebagian besar rumahtangga sudah menggunakan listrik tanpa melihat apakah bersumber dari PLN maupun non PLN. Untuk tahun 2017 yaitu sekitar 99,72 persen sudah menggunakan sumber penerangan listrik dari PLN dan rumahtangga yang menggunakan sumber penerangan listrik non PLN (Genset)

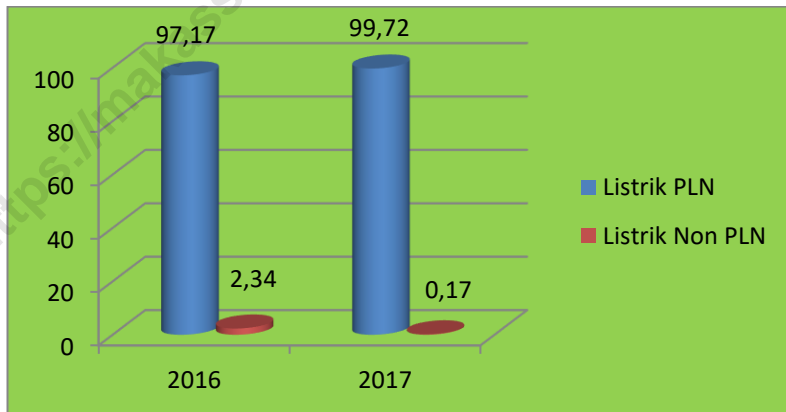
utamanya masyarakat atau rumah tangga yang bertempat tinggal di daerah Pulau yaitu sekitar 0,17 persen.

Tabel 7.7
 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Penerangan Di Kota
 Makassar Tahun 2016 dan 2017

Fasilitas Penerangan	2016 (%)	2017 (%)
(1)	(2)	(3)
- Listrik PLN	97,17	99,72
- Listrik non PLN	2,34	0,17
- Pelita/Lainnya	0,49	0,11

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2016 dan 2017

Grafik 9
 Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Penerangan di Kota
 Makassar Tahun 2016 dan 2017



BAB VIII INDIKATOR LAINNYA

Pengeluaran rumahtangga dapat dibedakan menurut pengeluaran makanan dan bukan makanan, dimana menggambarkan bagaimana penduduk Kota Makassar mengalokasikan kebutuhan rumahtangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, nilai pengeluaran rumahtangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk, khususnya dilihat dari segi ekonomi.

8.1. Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita

Tabel 8.1 menggambarkan perkembangan persentase penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita. Terlihat tahun 2017 persentase pengeluaran penduduk perkapita terbesar pada golongan pengeluaran diatas Rp. 1.500.000 yaitu sebesar 40,93 persen dan terendah pada golongan pengeluaran Rp. 200.000 – Rp. 299.999 sebesar 0,06 persen. Dari tabel ini juga tergambar bahwa semakin tinggi golongan pengeluaran perkapita semakin besar persentase penduduknya.

Tabel 8.1

Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Per Bulan
Kota Makassar Tahun 2017

No.	Golongan pengeluaran	Persentase Penduduk
1.	< 150.000	-
2.	150.000 – 199.999	0,06
3.	200.000 – 299.999	2,74
4.	300.000 – 499.999	14,53
5.	500.000 – 749.999	11,02
6.	750.000 – 999.999	11,43
7.	1.000.000 – 1.499.999	19,30
8.	1.500.000 +	40,93
	JUMLAH	100,00

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Susenas 2017

Pengeluaran perkapita sebulan di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 8.2. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pengeluaran rata-rata sebulan penduduk Kota Makassar menurut pengeluaran makanan sebesar Rp 613.354,- dan non makanan sebesar Rp 922.663,- tahun 2017.

Tabel 8.2

Pengeluaran perkapita sebulan dan pola konsumsi di Kota Makassar 2016-2017

Pengeluaran perkapita sebulan (Rp)				Pola konsumsi penduduk (%)			
Makanan		Non Makanan		Makanan		Non Makanan	
2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
582.223	613.354	854.382	922.663	40,53	39,93	59,47	60,07

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Susenas 2016-2017

Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 pola konsumsi penduduk untuk makanan pada tahun 2017 ini mengalami penurunan sebesar 0,60 poin, yakni 40,53 persen tahun 2016 menjadi 39,93 persen tahun 2017 sedangkan untuk konsumsi non makanan tahun 2016 sebesar 59,47 persen dan mengalami kenaikan sebesar 0,60 persen pada tahun 2017 menjadi 60,07 persen.

Jika melihat besarnya pengeluaran perkapita untuk konsumsi makanan dibandingkan non makanan maka dapat dilihat bahwa pengeluaran perkapita penduduk kota Makassar untuk non makanan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi makanan. Hal ini juga memberikan gambaran bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat relative lebih baik.

8.2. Kemiskinan

Miskin adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang/rumahtangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan yang layak bagi kehidupan. Penduduk atau rumahtangga miskin yang mengalami masalah/hambatan untuk dapat hidup secara layak, secara konseptual

disebut sebagai fakir miskin dan digolongkan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sesuai dengan defenisi yang disepakati fakir miskin adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum, baik berupa kebutuhan jasmani, rohani maupun sosial.

BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2100 kalori energi perkapita perhari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok.

Penduduk dengan pengeluaran perkapita di bawah garis kemiskinan diklasifikasikan sebagai penduduk miskin demikian pula penghitungan untuk penduduk fakir miskin. Pemanfaatan data kemiskinan yang dihasilkan oleh BPS biasanya digunakan Pemerintah untuk perencanaan makro, khususnya untuk menentukan alokasi dan besaran dana untuk membantu penduduk miskin dan fakir miskin, baik untuk tingkat nasional maupun tingkat wilayah.

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau sedikitnya bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari

perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain “seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin”.

Kemiskinan secara konseptual dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan.

Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (garis kemiskinan makanan) ditambah kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumahtangga dasar lainnya (garis kemiskinan non makanan).

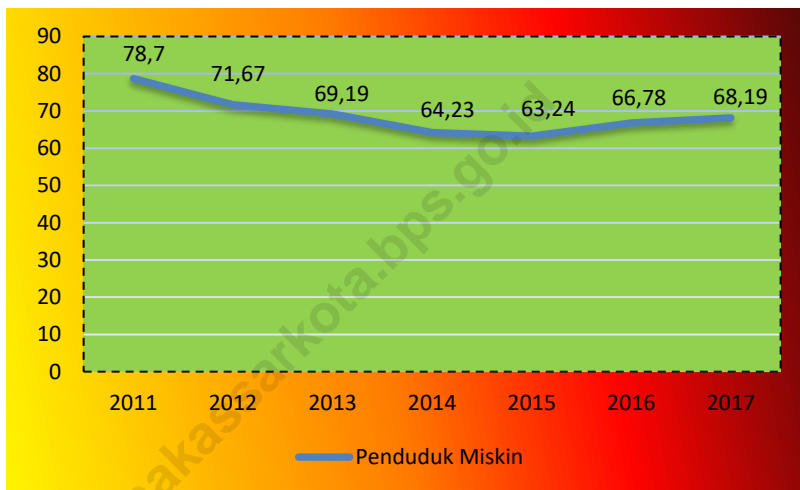
Tabel 8.3
Jumlah Penduduk Miskin, Persentase, dan Garis Kemiskinan di Kota Makassar
Tahun 2015– 2017

Uraian	2015	2016	2017
Jumlah Pend.Miskin (000)	63,24	66,78	68,19
Persentase pend.Miskin (%)	4,36	4,56	4,59
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	321.094	347.723	366.430

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Susenas 2015-2017

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 mengalami kenaikan jika dibanding dengan tahun 2016. Secara absolut jumlah penduduk miskin naik sebanyak 1,41 ribu jiwa pada periode 2017 dimana jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 sebanyak 68,19 ribu jiwa.

Grafik 10
Jumlah Penduduk Miskin dan Kota Makassar Tahun 2011-2017



Perubahan tingkat kemiskinan selama setahun terakhir ini dapat dilihat melalui analisis tren tingkat kemiskinan antara kondisi tahun 2011 dan tahun 2017. Analisis ini mencakup jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin dan mencakup garis kemiskinan, kemiskinan.

8.2.1. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk

memenuhi kebutuhan pokok minimum yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok non makanan.

Garis kemiskinan penduduk miskin Kota Makassar pada tahun 2017 sebesar Rp. 366.430,-/kapita/bulan. Garis kemiskinan ini mengalami peningkatan sebesar Rp.16.454,- jika dibandingkan tahun 2016 yang besarnya Rp.273.231/kapita/bulan. Pada table 8.2 dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2015-2017 garis kemiskinan penduduk kota Makassar terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini bisa jadi disebabkan karena adanya inflasi sehingga harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan atau bisa juga karena kemampuan penduduk miskin untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok menjadi lebih baik dari sebelumnya.

8.2.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kota Makassar tahun 2017 sebesar 68,19 ribu jiwa, angka ini mengalami peningkatan sebanyak 2,41 ribu jiwa dari tahun 2016, dimana jumlah penduduk miskin pada tahun 2016 sebesar 66,78 ribu jiwa. Pada grafik 10 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Makassar dalam kurun waktu 2015-2017 mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin sebesar 63,24 ribu jiwa, tahun 2016 meningkat menjadi 66,78 ribu jiwa dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 68,19 ribu jiwa. Peningkatan penduduk miskin dalam dua tahun terakhir perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Makassar agar permasalahan kemiskinan dapat diatasi dengan baik.

LAMPIRAN TABEL

<https://makassarkota.bps.go.id>

Tabel 2.1
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kotadi
Sulawesi Selatan Tahun 2014 s/d 2017

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Penduduk 2016-2017 (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kep. Selayar	128,744	130,199	131.605	133.003	1,06
02. Bulukumba	407,775	410,485	413.229	415.713	0,60
03. Bantaeng	182,283	183,386	184.517	185.581	0,58
04. Jeneponto	353,287	355,599	357.807	359.787	0,55
05. Takalar	283,762	286,906	289.978	292.983	1,04
06. Gowa	709,386	722,702	735.439	748.200	1,74
07. Sinjai	236,497	238,099	239.689	241.208	0,63
08. Maros	335,596	339,300	342.890	346.383	1,02
09. Pangkep	320,293	323,597	326.700	329.791	0,95
10. Barru	170,316	171,217	171.906	172.767	0,50
11. Bone	738,515	742,912	746.973	751.026	0,54
12. Soppeng	225,709	226,116	226.305	226.466	0,07
13. Wajo	391,980	393,218	394.495	395.583	0,28
14. Sidrap	286,610	289,787	292.985	296.125	1,07
15. Pinrang	364,087	366,789	369.595	372.230	0,71
16. Enrekang	198,194	199,998	201.614	203.320	0,85
17. Luwu	347,096	350,218	353.277	356.305	0,86
18. Tana Toraja	227,588	228,984	230.195	231.519	0,58
19. Luwu Utara	299,989	302,687	305.372	308.001	0,86
20. Luwu Timur	269,405	275,595	281.822	287.874	2,15
21. Toraja Utara	224,003	225,516	226.988	228.414	0,63
22. Makassar	1,429,242	1,449,401	1.469.601	1.489.011	1,32
23. Pare-Pare	136,903	138,699	140.423	142.097	1,19
24. Palopo	164,903	168,894	172.916	176.907	2,31
Sulawesi Selatan	8,432,163	8,520,304	8.606.375	8.690.294	0,98

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka 2017 & Proyeksi Penduduk 2017

Tabel 2.2
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	% Luas Wilayah	Penduduk	Distribusi Penduduk (%)	Kepadatan (pend/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kep. Selayar	903.5	1.97	133.003	1.53	147
02. Bulukumba	1,154.67	2.52	415.713	4.78	360
03. Bantaeng	395.83	0.86	185.581	2.14	469
04. Jeneponto	903.35	1.97	359.787	4.14	398
05. Takalar	566.51	1.24	292.983	3.37	517
06. Gowa	1,883.32	4.12	748.200	8.61	397
07. Sinjai	819.96	1.79	241.208	2.78	294
08. Maros	1,619.12	3.54	346.383	3.99	214
09. Pangkep	1,112.29	2.43	329.791	3.79	296
10. Barru	1,174.71	2.57	172.767	1.99	147
11. Bone	4559	9.96	751.026	8.64	165
12. Soppeng	1,359.44	2.97	226.466	2.61	167
13. Wajo	2506.2	5.48	395.583	4.55	158
14. Sidrap	1,883.25	4.12	296.125	3.41	157
15. Pinrang	1,961.17	4.29	372.230	4.28	190
16. Enrekang	1,786.01	3.9	203.320	2.34	114
17. Luwu	3,000.25	6.56	356.305	4.10	119
18. Tana Toraja	2054.3	4.49	231.519	2.66	113
19. Luwu Utara	7,502.68	16.39	308.001	3.54	41
20. Luwu Timur	6,944.88	15.18	287.874	3.31	41
21. Toraja Utara	1,151.47	2.52	228.414	2.63	198
22. Makassar	175.77	0.38	1.489.011	17.13	8.471
23. Pare-Pare	99.33	0.22	142.097	1.64	1.431
24. Palopo	247.52	0.54	176.907	2.04	715
Sulawesi Selatan	46,784.63	100	8.690.294	100.00	190

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka 2017 & Proyeksi Penduduk 2017

Tabel 2.3
Angka Beban Tanggungan dan Persentase Jumlah Penduduk Menurut
Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017

Kabupaten/Kota	0-14	15-64	65 +	Angka Beban Tanggungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Kep. Selayar	30,22	63,05	6,73	58,60
02. Bulukumba	29,47	64,43	6,10	55,21
03. Bantaeng	29,06	66,19	4,75	51,08
04. Jeneponto	29,75	64,69	5,56	54,58
05. Takalar	29,01	65,87	5,12	51,82
06. Gowa	29,82	65,49	4,69	52,70
07. Sinjai	31,13	62,56	6,31	59,85
08. Maros	30,37	65,01	4,62	53,82
09. Pangkep	30,57	64,86	4,57	54,17
10. Barru	29,62	63,44	6,94	57,63
11. Bone	29,43	64,12	6,45	55,96
12. Soppeng	25,95	64,89	9,16	54,11
13. Wajo	25,86	67,71	6,43	47,69
14. Sidrap	28,39	65,36	6,25	52,99
15. Pinrang	31,06	63,01	5,93	58,70
16. Enrekang	33,84	59,84	6,33	67,12
17. Luwu	34,19	60,63	5,18	64,93
18. Tana Toraja	33,24	60,50	6,27	65,30
19. Luwu Utara	32,02	62,48	5,50	60,06
20. Luwu Timur	31,96	64,57	3,47	54,86
21. Toraja Utara	35,27	57,79	6,94	73,04
22. Makassar	28,07	68,35	3,58	46,30
23. Pare-Pare	30,28	65,85	3,87	51,85
24. Palopo	30,12	66,44	3,44	50,51
Sulawesi Selatan	29,93	64,79	5,28	54,34

Sumber : Susenas 2017

Tabel 2.4
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017

Kabupaten/ Kota	Laki-laki					Perempuan				
	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	Total	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
01 Kep. Selayar	32,38	62,41	2,03	3,18	100,00	27,35	57,39	1,73	13,53	100,00
02 Bulukumba	34,52	61,37	0,96	3,15	100,00	28,25	57,27	2,22	12,25	100,00
03 Bantaeng	34,79	60,27	1,51	3,42	100,00	29,02	58,17	3,83	8,99	100,00
04 Jeneponto	37,40	57,89	1,26	3,44	100,00	30,88	55,15	1,80	12,17	100,00
05 Takalar	34,87	60,78	1,94	2,41	100,00	31,92	56,50	2,01	9,56	100,00
06 Gowa	37,71	58,71	1,34	2,24	100,00	31,62	56,91	2,52	8,95	100,00
07 Sinjai	38,36	58,31	0,67	2,66	100,00	29,74	56,30	2,78	11,17	100,00
08 Maros	37,87	58,30	1,82	2,01	100,00	31,84	55,48	2,99	9,69	100,00
09 Pangkep	40,05	56,06	1,11	2,77	100,00	32,53	53,13	3,38	10,96	100,00
10 Barru	38,89	55,53	2,89	2,69	100,00	27,57	53,08	6,16	13,19	100,00
11 Bone	37,17	58,31	1,29	3,23	100,00	29,52	52,87	4,32	13,29	100,00
12 Soppeng	35,81	59,39	1,80	3,00	100,00	27,84	52,74	4,79	14,63	100,00
13 Wajo	36,96	58,86	2,42	1,77	100,00	29,05	54,45	4,15	12,35	100,00
14 Sidrap	35,66	59,11	2,61	2,62	100,00	28,07	56,07	4,96	10,90	100,00
15 Pinrang	39,40	54,88	2,70	3,03	100,00	29,41	54,34	3,60	12,65	100,00
16 Enrekang	44,98	49,81	1,30	3,91	100,00	31,82	53,06	2,98	12,14	100,00
17 Luwu	45,36	50,23	1,51	2,90	100,00	33,95	51,70	4,57	9,77	100,00
18 Tana Toraja	47,20	48,76	0,41	3,63	100,00	33,33	52,99	3,31	10,37	100,00
19 Luwu Utara	39,59	56,10	2,01	2,30	100,00	29,36	57,70	3,30	9,64	100,00
20 Luwu Timur	37,71	58,14	1,76	2,38	100,00	28,86	62,54	2,10	6,50	100,00
21 Toraja Utara	48,69	46,21	1,26	3,84	100,00	36,16	50,19	2,92	10,73	100,00
22 Makassar	45,09	52,01	1,46	1,44	100,00	39,69	49,60	3,71	7,00	100,00
23 Parepare	44,44	52,06	1,59	1,92	100,00	35,71	50,02	3,74	10,53	100,00
24 Palopo	50,28	46,21	1,46	2,05	100,00	43,29	45,09	3,17	8,44	100,00
Sulawesi Selatan	40,05	55,83	1,58	2,54	100,00	32,36	53,88	3,41	10,35	100,00

Sumber : Susenas 2017

Tabel 3.1
Persentase Wanita Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Usia
Perkawinan Pertama dan Kabupaten/Kotadi Sulawesi Selatan Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Usia Perkawinan Pertama				
	<=16 tahun	17-18 tahun	19-20 tahun	21 tahun ke atas	Jumlah
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
01. Kep. Selayar	9,66	22,59	21,82	45,94	100,00
02. Bulukumba	17,26	16,35	19,47	46,92	100,00
03. Bantaeng	17,26	22,72	21,17	38,85	100,00
04. Jeneponto	15,47	22,00	21,12	41,42	100,00
05. Takalar	18,53	21,60	21,86	38,00	100,00
06. Gowa	12,42	23,06	21,29	43,22	100,00
07. Sinjai	16,00	18,64	19,44	45,92	100,00
08. Maros	16,62	20,59	20,82	41,97	100,00
09. Pangkep	18,84	20,97	21,21	38,98	100,00
10. Barru	17,12	25,57	19,37	37,95	100,00
11. Bone	27,49	21,18	19,25	32,08	100,00
12. Soppeng	23,90	17,63	19,69	38,78	100,00
13. Wajo	24,76	20,88	19,25	35,11	100,00
14. Sidrap	21,00	22,43	18,13	38,44	100,00
15. Pinrang	21,05	25,52	17,38	36,05	100,00
16. Enrekang	11,92	21,37	23,67	43,04	100,00
17. Luwu	18,67	20,62	24,53	36,19	100,00
18. Tana Toraja	14,07	15,68	19,75	50,50	100,00
19. Luwu Utara	17,23	25,29	21,09	36,40	100,00
20. Luwu Timur	13,95	23,21	23,09	39,75	100,00
21. Toraja Utara	15,40	18,42	25,25	40,93	100,00
22. Makassar	12,54	14,33	18,87	54,25	100,00
23. Pare-Pare	11,34	22,67	21,24	44,75	100,00
24. Palopo	9,86	15,35	20,23	54,55	100,00
Sulawesi Selatan	17,24	20,20	20,37	42,19	100,00

Sumber : Susenas 2017

Tabel 3.2
Persentase Akseptor KB Menurut Alat/cara Kontrasepsi yang Sedang
Digunakan dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017

Kabupaten/Kota	MOW/ MOP	AKDR/ IUD	Suntikan KB	Susuk KB	Pil KB	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Kep. Selayar	2,22	5,17	68,51	15,75	7,84	0,52	100,00
02 Bulukumba	0,27	0,82	68,70	5,51	19,45	5,25	100,00
03 Bantaeng	0,00	0,91	81,51	3,49	11,22	2,87	100,00
04 Jeneponto	0,17	0,88	85,08	7,68	5,99	0,21	100,00
05 Takalar	0,00	1,76	80,92	4,34	9,37	3,60	100,00
06 Gowa	0,17	1,50	73,24	5,60	17,43	2,04	100,00
07 Sinjai	0,00	3,84	72,71	8,91	12,57	1,98	100,00
08 Maros	0,66	2,76	54,27	6,42	34,38	1,51	100,00
09 Pangkep	2,40	2,12	66,25	4,72	21,46	3,05	100,00
10 Barru	1,56	0,27	54,43	6,07	36,91	0,76	100,00
11 Bone	1,71	1,20	54,67	9,05	26,93	6,43	100,00
12 Soppeng	0,45	1,74	35,61	8,89	51,25	2,06	100,00
13 Wajo	0,00	2,57	41,25	5,58	44,73	5,88	100,00
14 Sidrap	0,40	2,80	39,72	5,62	48,92	2,55	100,00
15 Pinrang	0,00	5,22	44,42	12,84	34,96	2,56	100,00
16 Enrekang	5,47	2,90	30,04	33,85	16,95	10,78	100,00
17 Luwu	3,62	2,82	45,88	17,09	20,25	10,33	100,00
18 Tana Toraja	10,06	10,04	39,64	13,83	19,04	7,40	100,00
19 Luwu Utara	2,61	3,45	49,53	8,21	29,73	6,46	100,00
20. Luwu Timur	0,53	8,59	35,68	22,32	29,45	3,43	100,00
21. Toraja Utara	2,28	6,82	54,73	16,22	17,78	2,17	100,00
22 Makassar	3,32	9,16	50,22	5,05	17,94	14,31	100,00
23 Parepare	7,55	6,14	42,95	6,85	31,35	5,16	100,00
24. Palopo	5,64	5,29	50,29	4,91	23,64	10,23	100,00
Sulawesi Selatan	1,72	3,68	56,64	8,75	23,85	5,35	100,00

Sumber : Susenas 2017

Tabel 3.3
Persentase partisipasi KB penduduk perempuan berumur 15-49 tahun yang
Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Sedang Menggunakan alat/Cara KB		
	Ya, Pernah	Ya, Sedang	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Kep. Selayar	28,44	34,20	37,36
02. Bulukumba	17,37	47,94	34,69
03. Bantaeng	13,88	52,92	33,20
04. Jeneponto	15,61	57,06	27,33
05. Takalar	20,26	51,93	27,81
06. Gowa	16,86	46,44	36,69
07. Sinjai	21,26	37,60	41,15
08. Maros	19,61	42,62	37,77
09. Pangkep	11,43	48,45	40,12
10. Barru	14,94	37,66	47,40
11. Bone	16,77	44,24	39,00
12. Soppeng	15,82	44,98	39,20
13. Wajo	25,33	39,37	35,30
14. Sidrap	14,42	47,87	37,71
15. Pinrang	16,27	45,89	37,84
16. Enrekang	13,73	48,16	38,10
17. Luwu	24,68	38,77	36,55
18. Tana Toraja	18,30	51,70	30,00
19. Luwu Utara	14,49	56,24	29,27
20. Luwu Timur	12,02	54,07	33,91
21. Toraja Utara	25,04	44,06	30,90
22. Makassar	22,26	33,95	43,79
23. Pare-Pare	20,29	41,30	38,41
24. Palopo	11,88	43,49	44,63
Sulawesi Selatan	18,33	44,40	37,27

Sumber : Susenas 2017

Tabel 4.1
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur
Pendidikan (7-18 Tahun) di Sulawesi Selatan Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur		
	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Kep. Selayar	98,64	96,00	58,95
02. Bulukumba	98,72	92,80	70,86
03. Bantaeng	97,79	91,95	65,93
04. Jeneponto	100,00	87,23	62,47
05. Takalar	99,67	89,38	57,55
06. Gowa	98,76	95,00	64,44
07. Sinjai	99,40	93,34	77,94
08. Maros	99,68	95,44	79,14
09. Pangkep	99,60	90,50	63,57
10. Barru	99,77	94,86	68,98
11. Bone	98,51	93,75	56,22
12. Soppeng	98,78	94,51	77,91
13. Wajo	96,78	82,56	59,81
14. Sidrap	99,19	89,30	65,06
15. Pinrang	99,79	93,35	66,58
16. Enrekang	100,00	98,26	89,04
17. Luwu	99,02	93,51	77,53
18. Tana Toraja	99,64	96,82	72,98
22. Luwu Utara	99,03	91,44	66,13
25. Luwu Timur	99,47	97,68	72,28
26. Toraja Utara	99,50	96,04	79,14
71. Makassar	99,35	93,40	79,42
72. Pare-Pare	98,91	92,59	80,85
73. Palopo	99,23	98,13	88,34
Sulawesi Selatan	99,13	93,07	70,58

Sumber : Susenas 2017

Tabel 4.2
Angka Partisipasi Murni (APM) Formal Menurut Kabupaten/Kota dan
Kelompok Umur Pendidikan (7-18 Tahun) di Sulawesi Selatan Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur		
	SD	SLTP	SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Kep. Selayar	98,64	83,64	50,11
02. Bulukumba	97,85	78,30	64,50
03. Bantaeng	97,69	65,35	56,46
04. Jeneponto	99,66	63,95	53,48
05. Takalar	97,89	68,99	55,50
06. Gowa	97,32	72,22	59,70
07. Sinjai	99,02	78,77	72,62
08. Maros	96,74	74,63	62,77
09. Pangkep	99,20	69,93	58,62
10. Barru	96,04	80,91	60,26
11. Bone	95,63	79,83	49,42
12. Soppeng	98,78	77,06	65,97
13. Wajo	95,64	60,81	55,37
14. Sidrap	98,93	75,69	55,42
15. Pinrang	99,08	72,00	60,07
16. Enrekang	99,77	83,68	69,37
17. Luwu	97,85	75,22	64,95
18. Tana Toraja	99,35	82,23	48,85
22. Luwu Utara	99,03	70,53	58,41
25. Luwu Timur	98,91	80,82	64,47
26. Toraja Utara	98,13	81,67	63,72
71. Makassar	92,83	72,94	62,47
72. Pare-Pare	98,16	73,08	60,76
73. Palopo	99,23	77,89	66,42
Sulawesi Selatan	97,20	74,33	59,84

Sumber : Susenas 2017

Tabel 4.3
Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut
Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Kep. Selayar	90,42	84,08	87,11
02. Bulukumba	92,89	87,60	90,03
03. Bantaeng	84,84	83,37	84,07
04. Jeneponto	82,91	81,89	82,38
05. Takalar	86,16	82,31	84,12
06. Gowa	90,56	87,44	88,95
07. Sinjai	90,20	87,04	88,54
08. Maros	90,65	82,91	86,63
09. Pangkep	92,10	85,29	88,52
10. Barru	91,52	88,81	90,08
11. Bone	91,14	85,03	87,87
12. Soppeng	92,49	90,17	91,23
13. Wajo	90,83	84,67	87,55
14. Sidrap	92,37	89,09	90,66
15. Pinrang	90,54	85,91	88,10
16. Enrekang	94,46	87,62	91,04
17. Luwu	93,12	88,91	90,93
18. Tana Toraja	88,37	85,95	87,17
22. Luwu Utara	93,75	89,88	91,81
25. Luwu Timur	94,85	91,93	93,42
26. Toraja Utara	89,10	83,63	86,35
71. Makassar	98,39	98,20	98,29
72. Pare-Pare	96,60	96,30	96,45
73. Palopo	97,45	97,44	97,45
Sulawesi Selatan	92,31	88,72	90,44

Sumber : Susenas 2017

Tabel 4.4
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi Ditamatkan di Sulawesi Selatan Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Tamat SD atau kurang	Tamat SLTP	Tamat SLTA +
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Kep. Selayar	57,90	13,41	28,69
02. Bulukumba	55,00	17,60	27,40
03. Bantaeng	56,30	15,46	28,24
04. Jeneponto	58,46	16,71	24,83
05. Takalar	51,53	19,92	28,55
06. Gowa	45,26	21,26	33,47
07. Sinjai	52,94	19,80	27,26
08. Maros	46,91	17,69	35,40
09. Pangkep	54,55	18,11	27,34
10. Barru	47,84	21,29	30,87
11. Bone	61,75	16,07	22,18
12. Soppeng	53,19	17,46	29,36
13. Wajo	61,53	15,71	22,76
14. Sidrap	50,73	19,80	29,48
15. Pinrang	51,73	18,54	29,72
16. Enrekang	41,81	22,79	35,40
17. Luwu	44,39	22,33	33,28
18. Tana Toraja	46,91	18,22	34,87
22. Luwu Utara	54,13	19,94	25,93
25. Luwu Timur	45,76	20,32	33,92
26. Toraja Utara	46,40	22,30	31,30
71. Makassar	29,10	18,71	52,19
72. Pare-Pare	29,36	18,95	51,69
73. Palopo	21,20	23,63	55,17
Sulawesi Selatan	47,23	18,82	33,95

Sumber : Susenas 2017

Tabel 5.1
Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan
Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH)**			
	2014	2015	2016	2017
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kep. Selayar	67.50	67.70	69,82	69,84
02. Bulukumba	66.43	66.73	67,76	67,82
03. Bantaeng	69.68	69.77	66,84	66,96
04. Jeneponto	65.39	65.49	69,84	69,90
05. Takalar	65.90	66.20	65,57	65,65
06. Gowa	69.78	69.88	66,29	66,38
07. Sinjai	66.36	66.46	69,92	69,95
08. Maros	68.50	68.55	66,54	66,61
09. Pangkep	65.37	65.67	68,58	68,60
10. Barru	67.73	68.03	65,77	65,86
11. Bone	65.81	66.01	68,16	68,30
12. Soppeng	68.42	68.52	66,12	66,22
13. Wajo	65.93	66.23	68,62	68,72
14. Sidrap	68.07	68.57	66,38	66,52
15. Pinrang	68.03	68.43	68,69	68,82
16. Enrekang	70.21	70.31	68,55	68,68
17. Luwu	69.14	69.44	70,34	70,38
18. Tana Toraja	72.11	72.41	69,52	69,60
22. Luwu Utara	67.00	67.40	72,48	72,56
25. Luwu Timur	69.44	69.64	67,50	67,61
26. Toraja Utara	72.50	72.80	69,71	69,79
71. Makassar	71.38	71.47	72,87	72,94
72. Pare-Pare	70.39	70.59	71,49	71,51
73. Palopo	70.12	70.20	70,64	70,69
Sulawesi Selatan	69.60	69.80	70,25	70,30

Sumber : *SP2010 dan **IPM 2016 Metode Baru

Tabel 5.2
Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Lalu Terhadap Total Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Sulawesi Selatan Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Kep. Selayar	19,78	22,25	21,06
02. Bulukumba	24,49	27,12	25,88
03. Bantaeng	44,84	48,80	46,89
04. Jeneponto	27,34	32,98	30,26
05. Takalar	32,45	34,59	33,56
06. Gowa	23,11	24,82	23,98
07. Sinjai	22,37	24,85	23,65
08. Maros	30,08	31,97	31,05
09. Pangkep	21,98	24,70	23,38
10. Barru	22,30	28,27	25,40
11. Bone	21,52	22,84	22,21
12. Soppeng	15,51	17,94	16,80
13. Wajo	26,94	27,80	27,38
14. Sidrap	17,72	22,68	20,25
15. Pinrang	26,78	29,57	28,22
16. Enrekang	19,25	21,44	20,34
17. Luwu	24,12	26,60	25,38
18. Tana Toraja	16,03	19,16	17,57
22. Luwu Utara	23,74	25,10	24,41
25. Luwu Timur	24,56	25,20	24,87
26. Toraja Utara	15,36	16,00	15,68
71. Makassar	21,29	24,47	22,90
72. Pare-Pare	27,43	32,13	29,82
73. Palopo	19,54	20,09	19,82
Sulawesi Selatan	23,38	25,96	24,70

Sumber : Susenas 2017

Tabel 5.3
Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Sebulan Lalu Menurut
Kabupaten/Kota dan Jumlah Hari Sakit di Sulawesi Selatan Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Jumlah Hari Sakit					
	<4	4-7	8-14	15-21	22-30	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Selayar	57,06	25,93	4,44	1,23	11,34	100,00
02. Bulukumba	51,08	39,18	2,75	0,39	6,59	100,00
03. Bantaeng	57,40	30,17	4,57	3,78	4,08	100,00
04. Jeneponto	51,14	30,74	8,28	2,25	7,60	100,00
05. Takalar	48,13	35,54	7,31	3,41	5,62	100,00
06. Gowa	50,66	34,12	7,11	1,70	6,41	100,00
07. Sinjai	51,58	26,43	6,73	2,86	12,41	100,00
08. Maros	57,81	28,34	2,39	3,84	7,62	100,00
09. Pangkep	56,79	32,87	3,24	0,00	7,10	100,00
10. Barru	63,16	22,54	4,96	1,64	7,70	100,00
11. Bone	53,16	21,92	12,81	3,62	8,49	100,00
12. Soppeng	36,97	24,46	8,27	6,84	23,45	100,00
13. Wajo	58,53	22,29	4,50	5,74	8,95	100,00
14. Sidrap	38,75	28,30	15,85	6,61	10,48	100,00
15. Pinrang	51,44	32,50	5,71	3,23	7,12	100,00
16. Enrekang	54,98	32,51	4,35	2,57	5,59	100,00
17. Luwu	47,85	39,39	4,54	1,60	6,61	100,00
18. Tana Toraja	46,72	32,55	7,47	0,78	12,47	100,00
22. Luwu Utara	53,66	28,81	3,40	2,27	11,85	100,00
25. Luwu Timur	58,24	30,24	3,18	2,77	5,57	100,00
26. Toraja Utara	54,13	34,61	2,89	0,00	8,37	100,00
71. Makassar	55,06	33,43	3,60	4,64	3,26	100,00
72. Pare-Pare	63,61	20,33	3,13	3,35	9,59	100,00
73. Palopo	50,66	36,84	1,77	0,88	9,86	100,00
Sulawesi Selatan	53,09	30,98	5,65	2,92	7,35	100,00

Sumber : Susenas 2017

Tabel 5.4
Persentase Balita Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Persalinan
Terakhirdi Sulawesi Selatan Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Dokter Kandungan/ Umum	Bidan/Perawat/ Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	14,34	85,66	100.0
02. Bulukumba	17,96	82,04	100.0
03. Bantaeng	15,89	84,11	100.0
04. Jeneponto	13,93	86,07	100.0
05. Takalar	19,96	80,04	100.0
06. Gowa	24,03	75,97	100.0
07. Sinjai	24,64	75,36	100.0
08. Maros	26,70	73,30	100.0
09. Pangkep	17,03	82,97	100.0
10. Barru	27,12	72,88	100.0
11. Bone	13,92	86,08	100.0
12. Soppeng	19,73	80,27	100.0
13. Wajo	13,46	86,54	100.0
14. Sidrap	20,50	79,50	100.0
15. Pinrang	14,11	85,89	100.0
16. Enrekang	23,69	76,31	100.0
17. Luwu	18,67	81,33	100.0
18. Tana Toraja	34,19	65,81	100.0
22. Luwu Utara	23,13	76,87	100.0
25. Luwu Timur	18,42	81,58	100.0
26. Toraja Utara	33,58	66,42	100.0
71. Makassar	68,06	31,94	100.0
72. Pare-Pare	45,35	54,65	100.0
73. Palopo	31,67	68,33	100.0
Sulawesi Selatan	28,38	71,62	100.0

Sumber : Susenas 2017

Tabel 5.5
Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Disusui Menurut
Kabupaten/Kota dan Lamanya Disusui di Sulawesi Selatan Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Lama Disusui (Bulan)				Jumlah
	<12	12-15	16-19	20-23	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Selayar	80,34	5,48	6,08	8,11	100,00
02. Bulukumba	53,88	26,76	19,36	0,00	100,00
03. Bantaeng	44,94	29,34	14,85	10,88	100,00
04. Jeneponto	65,03	15,06	14,49	5,42	100,00
05. Takalar	47,88	27,13	12,78	12,22	100,00
06. Gowa	46,28	20,36	25,30	8,07	100,00
07. Sinjai	58,18	17,19	11,59	13,04	100,00
08. Maros	58,79	6,91	18,82	15,48	100,00
09. Pangkep	74,93	8,54	11,97	4,56	100,00
10. Barru	65,73	19,96	1,94	12,37	100,00
11. Bone	36,45	23,76	33,30	6,49	100,00
12. Soppeng	44,55	26,32	9,34	19,78	100,00
13. Wajo	55,63	7,02	17,09	20,25	100,00
14. Sidrap	68,23	22,95	0,00	8,83	100,00
15. Pinrang	51,50	19,79	12,90	15,81	100,00
16. Enrekang	52,31	25,47	8,96	13,26	100,00
17. Luwu	65,40	15,53	9,03	10,04	100,00
18. Tana Toraja	55,44	26,12	14,71	3,73	100,00
22. Luwu Utara	55,99	25,10	13,88	5,03	100,00
25. Luwu Timur	66,98	18,57	8,17	6,28	100,00
26. Toraja Utara	65,18	18,13	13,18	3,52	100,00
71. Makassar	64,92	23,11	7,39	4,58	100,00
72. Pare-Pare	73,87	16,13	10,00	0,00	100,00
73. Palopo	74,58	21,90	3,52	0,00	100,00
Sulawesi Selatan	57,98	20,23	13,96	7,82	100,00

Sumber : Susenas 2017

Tabel 6.1
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama Selama
Seminggu yang Lalu dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Bekerja	Pengangguran	Bukan Angkatan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	55.866	1.337	95.018
02. Bulukumba	176.184	6.833	302.220
03. Bantaeng	98.947	5.460	134.367
04. Jeneponto	159.956	5.484	258.996
05. Takalar	130.960	6.785	214.005
06. Gowa	312.726	20.453	535.919
07. Sinjai	112.970	5.362	169.981
08. Maros	132.854	9.767	246.735
09. Pangkep	129.514	9.819	234.737
10. Barru	70.328	4.174	125.276
11. Bone	302.832	14.446	547.225
12. Soppeng	102.239	2.847	172.724
13. Wajo	171.871	5.430	301.309
14. Sidrap	103.628	3.396	217.659
15. Pinrang	146.653	6.769	262.913
16. Enrekang	94.504	1.797	136.894
17. Luwu	148.516	7.462	241.127
18. Tana Toraja	98.587	5.852	155.601
22. Luwu Utara	141.429	4.841	211.347
25. Luwu Timur	134.795	3.572	197.570
26. Toraja Utara	93.965	4.161	150.204
71. Makassar	548.368	64.954	1.110.488
72. Pare-Pare	63.693	4.409	102.183
73. Palopo	67.278	8.285	126.879
Sulawesi Selatan	3.598.663	213.695	6.251.377

Sumber : Sakernas Agustus 2017

Tabel 6.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi
Selatan Tahun 2017

Kabupaten/Kota	TPAK	TPT
(1)	(2)	(3)
01. Selayar	60,20	2,34
02. Bulukumba	60,56	3,73
03. Bantaeng	77,70	5,23
04. Jeneponto	63,88	3,31
05. Takalar	64,37	4,93
06. Gowa	62,17	6,14
07. Sinjai	69,61	4,53
08. Maros	57,80	6,85
09. Pangkep	59,36	7,05
10. Barru	59,47	5,6
11. Bone	57,98	4,55
12. Soppeng	60,84	2,71
13. Wajo	58,84	3,06
14. Sidrap	49,17	3,17
15. Pinrang	58,35	4,41
16. Enrekang	70,35	1,87
17. Luwu	64,69	4,78
18. Tana Toraja	67,12	5,6
22. Luwu Utara	69,21	3,31
25. Luwu Timur	70,03	2,58
26. Toraja Utara	65,33	4,24
71. Makassar	55,23	10,59
72. Pare-Pare	66,65	6,47
73. Palopo	59,56	10,96
Sulawesi Selatan	60,98	5,61

Sumber : Sakernas Agustus 2017

Tabel 6.3
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut
Lapangan Usaha dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Selayar	19.931	5.219	8.278	14.500	7.938
02. Bulukumba	85.439	11.049	38.675	25.895	15.126
03. Bantaeng	52.035	4.797	14.104	17.551	10.460
04. Jeneponto	83.312	4.555	26.673	15.177	30.239
05. Takalar	50.819	11.338	31.058	17.928	19.817
06. Gowa	97.670	38.031	69.809	52.340	54.876
07. Sinjai	69.243	3.327	12.875	20.161	7.364
08. Maros	33.057	16.544	32.385	24.907	25.961
09. Pangkep	38.475	17.790	28.100	21.942	23.207
10. Barru	24.416	4.127	15.003	14.010	12.772
11. Bone	151.389	13.098	58.658	57.035	22.652
12. Soppeng	47.015	6.409	18.677	18.558	11.580
13. Wajo	73.200	18.330	32.333	30.077	17.931
14. Sidrap	47.235	8.472	18.552	15.980	13.389
15. Pinrang	60.526	9.459	36.222	25.533	14.913
16. Enrekang	58.344	5.447	9.749	15.555	5.409
17. Luwu	89.846	8.347	23.090	15.590	11.643
18. Tana Toraja	71.086	1.069	6.020	11.144	9.268
22. Luwu Utara	81.523	5.791	22.157	16.610	15.348
25. Luwu Timur	68.754	5.354	17.000	20.287	23.400
26. Toraja Utara	60.786	3.133	4.998	14.188	10.860
71. Makassar	18.307	52.210	195.155	151.428	131.268
72. Pare-Pare	2.388	4.879	25.610	16.496	14.320
73. Palopo	6.843	4.161	21.574	20.007	14.693
Sulawesi Selatan	1.391.639	262.936	766.755	652.899	524.434

Sumber : Sakernas Agustus 2017

Tabel 6.4
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017

Kabupaten/Kota	0	1-14	15-34	35+	Jumlah
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)
01. Selayar	1.308	3.334	14.143	37.081	55.866
02. Bulukumba	4.290	17.205	60.702	93.987	176.184
03. Bantaeng	1.571	19.684	31.700	45.992	98.947
04. Jeneponto	1.345	19.219	45.121	94.271	159.956
05. Takalar	6.706	15.749	34.106	74.399	130.960
06. Gowa	1.898	22.587	55.533	232.708	312.726
07. Sinjai	1.609	15.073	29.222	67.066	112.970
08. Maros	5.320	8.613	26.721	92.200	132.854
09. Pangkep	2.390	13.586	27.223	86.315	129.514
10. Barru	5.269	4.899	15.735	44.425	70.328
11. Bone	7.719	43.879	93.874	157.360	302.832
12. Soppeng	2.019	13.247	30.072	56.901	102.239
13. Wajo	3.613	28.142	59.141	80.975	171.871
14. Sidrap	6.548	15.409	35.466	46.205	103.628
15. Pinrang	5.700	21.690	41.227	78.036	146.653
16. Enrekang	2.086	12.220	25.128	55.070	94.504
17. Luwu	3.731	22.801	50.422	71.562	148.516
18. Tana Toraja	2.572	15.904	44.566	35.545	98.587
22. Luwu Utara	5.639	17.538	51.611	66.641	141.429
25. Luwu Timur	2.690	12.499	26.775	92.831	134.795
26. Toraja Utara	580	13.768	33.063	46.554	93.965
71. Makassar	18.388	28.223	52.876	448.881	548.368
72. Pare-Pare	1.630	3.324	11.524	47.215	63.693
73. Palopo	1.359	1.849	8.618	55.452	67.278
Sulawesi Selatan	95.980	390.442	904.569	2.207.672	3.598.663

Sumber : Sakernas Agustus 2017

Tabel 7.1
Persentase Rumah-tangga Menurut Luas Lantai dan Kabupaten/Kota di
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Luas Lantai (M ²)					
	< 20	20 – 49	50 – 99	100 – 149	150+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Selayar	2,69	26,94	49,63	14,33	6,41	100,00
02. Bulukumba	0,61	11,88	56,02	22,98	8,51	100,00
03. Bantaeng	0,56	20,52	44,15	21,05	13,71	100,00
04. Jenepono	0,73	9,02	51,05	32,29	6,91	100,00
05. Takalar	0,46	23,32	48,46	19,34	8,42	100,00
06. Gowa	1,79	25,64	51,21	14,68	6,68	100,00
07. Sinjai	0,23	10,52	57,67	22,79	8,80	100,00
08. Maros	1,47	21,04	46,90	20,06	10,52	100,00
09. Pangkep	2,23	30,15	45,31	12,69	9,62	100,00
10. Barru	0,80	24,29	49,30	17,67	7,93	100,00
11. Bone	1,72	12,00	50,61	24,96	10,72	100,00
12. Soppeng	0,97	14,98	46,25	24,45	13,35	100,00
13. Wajo	1,60	15,32	40,00	29,13	13,95	100,00
14. Sidrap	0,28	23,46	48,13	21,31	6,82	100,00
15. Pinrang	1,90	21,14	47,79	20,24	8,93	100,00
16. Enrekang	2,57	21,75	60,39	12,27	3,02	100,00
17. Luwu	1,43	19,26	50,92	20,31	8,07	100,00
18. Tana Toraja	8,60	39,96	40,14	7,63	3,67	100,00
22. Luwu Utara	0,44	20,04	59,46	16,06	4,00	100,00
25. Luwu Timur	1,50	25,18	49,28	14,62	9,43	100,00
26. Toraja Utara	1,56	32,80	43,74	14,33	7,58	100,00
71. Makassar	11,92	22,42	33,42	14,41	17,83	100,00
72. Pare-Pare	4,11	24,57	40,32	15,88	15,13	100,00
73. Palopo	8,83	20,78	42,15	18,16	10,08	100,00
Sulawesi Selatan	3,46	20,68	46,58	18,97	10,31	100,00

Sumber : Susenas 2017

Tabel 7.2
Persentase Rumah tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum
di Sulawesi Selatan Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Air dalam Kemasan	Air Isi Ulang	Leding	Sumur/Mata Air/Pompa	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Selayar	1,01	52,37	7,86	37,96	0,80
02. Bulukumba	0,50	31,07	10,45	57,97	0,00
03. Bantaeng	3,60	18,53	38,09	39,78	0,00
04. Jeneponto	0,75	29,74	10,73	58,78	0,00
05. Takalar	0,56	24,18	13,66	61,60	0,00
06. Gowa	0,50	39,14	3,95	56,40	0,00
07. Sinjai	0,00	16,29	14,14	67,94	1,63
08. Maros	2,51	46,52	9,91	36,73	4,33
09. Pangkep	0,00	54,60	3,20	29,72	12,48
10. Barru	0,32	32,61	12,74	48,97	5,35
11. Bone	0,25	18,32	10,40	69,34	1,69
12. Soppeng	0,78	13,71	6,43	77,79	1,30
13. Wajo	0,88	26,96	16,69	48,13	7,34
14. Sidrap	0,80	26,48	7,80	64,67	0,25
15. Pinrang	0,69	39,15	2,59	55,16	2,42
16. Enrekang	0,13	13,43	10,55	69,32	6,56
17. Luwu	0,32	24,15	4,27	70,55	0,71
18. Tana Toraja	0,51	5,95	8,71	84,31	0,52
22. Luwu Utara	0,58	19,33	6,98	69,43	3,68
25. Luwu Timur	0,77	34,92	8,33	55,47	0,50
26. Toraja Utara	0,00	3,49	25,05	71,46	0,00
71. Makassar	5,33	56,04	35,53	3,09	0,00
72. Pare-Pare	4,41	57,28	20,16	18,08	0,07
73. Palopo	0,23	44,69	47,60	7,48	0,00
Sulawesi Selatan	1,72	35,38	16,27	44,90	1,73

Sumber : Susenas 2017 , Catatan : Lainnya ; Air Sungai, Air Hujan dll

Tabel 7.3
Persentase Rumah tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Fasilitas Tempat
Buang Air Besar di Sulawesi Selatan Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Selayar	54,24	7,55	11,40	26,82
02. Bulukumba	85,13	4,29	2,05	8,52
03. Bantaeng	75,46	6,78	4,69	13,07
04. Jeneponto	58,31	11,73	2,00	27,96
05. Takalar	71,20	11,72	2,66	14,43
06. Gowa	85,55	5,49	2,35	6,60
07. Sinjai	83,72	4,84	1,52	9,92
08. Maros	76,79	8,69	3,23	11,29
09. Pangkep	64,94	12,46	0,88	21,72
10. Barru	79,67	5,17	1,63	13,53
11. Bone	75,59	5,74	1,17	17,51
12. Soppeng	87,74	4,65	0,36	7,26
13. Wajo	80,48	10,29	0,44	8,79
14. Sidrap	72,34	15,67	1,19	10,81
15. Pinrang	73,86	10,33	0,55	15,26
16. Enrekang	71,14	15,82	1,67	11,38
17. Luwu	66,55	3,95	2,23	27,27
18. Tana Toraja	82,01	6,46	0,92	10,61
22. Luwu Utara	72,07	8,18	0,77	18,98
25. Luwu Timur	74,15	7,80	0,56	17,49
26. Toraja Utara	82,72	11,11	0,77	5,40
71. Makassar	83,69	13,76	1,87	0,68
72. Pare-Pare	78,97	12,77	3,41	4,85
73. Palopo	89,38	4,99	2,50	3,13
Sulawesi Selatan	77,40	9,12	1,85	11,64

Sumber : Susenas 2017

Tabel 7.4
Persentase Rumah tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan
Rumah di Sulawesi Selatan Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Rumah Sendiri	Bukan Rumah Sendiri
(1)	(2)	(3)
01. Selayar	88,16	11,84
02. Bulukumba	91,13	8,87
03. Bantaeng	90,18	9,82
04. Jeneponto	91,98	8,02
05. Takalar	94,08	5,92
06. Gowa	95,09	4,91
07. Sinjai	94,67	5,33
08. Maros	86,79	13,21
09. Pangkep	85,10	14,90
10. Barru	87,14	12,86
11. Bone	92,82	7,18
12. Soppeng	92,22	7,78
13. Wajo	85,21	14,79
14. Sidrap	85,28	14,72
15. Pinrang	88,95	11,05
16. Enrekang	83,11	16,89
17. Luwu	88,68	11,32
18. Tana Toraja	83,01	16,99
22. Luwu Utara	90,89	9,11
25. Luwu Timur	80,08	19,92
26. Toraja Utara	71,72	28,28
71. Makassar	56,65	43,35
72. Pare-Pare	64,25	35,75
73. Palopo	66,29	33,71
Sulawesi Selatan	82,75	17,25

Sumber : Susenas 2017

Tabel 8.1
Pola Konsumsi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pengeluaran
Tahun 2017

Kabupaten/ Kota	Makanan	Non Makanan	Total Pengeluaran
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Selayar	55,69	44,31	712.601
02 Bulukumba	53,49	46,55,	670.712
03 Bantaeng	51,14	48,86	778.894
04 Jeneponto	57,33	42,67	521.235
05 Takalar	50,76	49,24	703.606
06 Gowa	47,33	52,67	835.303
07 Sinjai	50,48	49,52	723.638
08 Maros	44,38	55,62	1.012.798
09 Pangkep	47,27	52,73	719.649
10 Barru	49,77	50,23	734.643
11 Bone	50,63	49,37	612.758
12 Soppeng	52,72	47,28	552.856
13 Wajo	50,76	49,24	783.276
14 Sidrap	48,63	51,37	926.687
15 Pinrang	48,81	51,19	763.612
16 Enrekang	50,43	49,57	677.429
17 Luwu	57,73	42,27	643.028
18 Tana Toraja	54,32	45,68	769.362
22 Luwu Utara	51,72	48,28	655.397
25 Luwu Timur	46,32	53,68	967.118
26. Toraja Utara	55,00	45,00	606.296
71 Makassar	40,53	59,47	1.436.605
72 Parepare	43,67	56,33	981.983
73 Palopo	48,81	51,19	876.928
Sulawesi Selatan	47,40	52,60	859.529

Sumber : Susenas 2017

Tabel 8.2
Jumlah (000) dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kotadi
Sulawesi Selatan Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin(000)
(1)	(2)
01. Kep. Selayar	17.21
02. Bulukumba	33.25
03. Bantaeng	17.53
04. Jeneponto	55.32
05. Takalar	27.05
06. Gowa	61.52
07. Sinjai	22.51
08. Maros	39.02
09. Pangkep	52.86
10. Barru	16.24
11. Bone	75.09
12. Soppeng	19.12
13. Wajo	29.46
14. Sidrap	15.92
15. Pinrang	31.28
16. Enrekang	26.98
17. Luwu	50.58
18. Tana Toraja	28.42
22. Luwu Utara	43.75
25. Luwu Timur	21.08
26. Toraja Utara	33.02
71. Makassar	66.78
72. Pare-Pare	8.02
73. Palopo	15.02
Sulawesi Selatan	807.03

Sumber :BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2017

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2017), Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017, Sul Sel
- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2017), Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016, Sul Sel
- BPS , Provinsi Sulawesi Selatan, (2017), Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017, Sul Sel
- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2017), Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017, Sul Sel
- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2017), Hasil Sensus Penduduk 2010 Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010, Sul-Sel
- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2016), Indikator Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2016, Sul Sel
- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2017), Percepatan penyediaan Data Statistik dalam rangka Alokasi Dana Perimbangan Daerah, Penduduk Pertengahan tahun 2010-2017 Provinsi Sulawesi Selatan, 2017
- BPS, Kota Makassar, Makassar Dalam Angka Kota Makassar, 2011-2017, Makassar
- BPS, Kota Makassar, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar, 2011-2017, Maakssar